



2022
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
Jln. Magamu No. 84 Kel. Baru Kec. Baolan Tolitoli
Telp / Fax : (0453) 2521015
Email : pntolitoli@yahoo.com
website : www.pn-tolitoli.go.id
Instagram : @pn_tolitoli
Facebook : Pengadilan Negeri Tolitoli

KATA PENGATAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Tolitoli diukur berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana terdapat dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020-2024. Namun disadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai, Pengadilan Negeri Tolitoli akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli ke depan.

Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Tolitoli untuk meningkatkan pencapaiannya di masa yang akan datang.

Tolitoli, 21 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli,



SAPTONO, SH.MH.

NIP. 197607182001121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar dan Grafik	vii
Ringkasan Eksekutif	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	10
C. Struktur Organisasi dan Dukungan SDM.....	12
D. Sistematika Penyajian.....	27
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	29
B. Indikator Kinerja Utama.....	31
C. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	34
D. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	40
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	42
C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	81
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
LAMPIRAN:	
- SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2021	
- Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tolitoli	
- Matriks Tahun 2020-2024	
- Indikator Kinerja Utama	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
- Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2021	
- Penghargaan yang telah diterima pengadilan Negeri Tolitoli	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli	i
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli	13
Tabel 1.3	Jumlah Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Tolitoli	14
Tabel 1.4	Jumlah Tenaga Non Teknis Pengadilan Negeri Tolitoli	15
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tolitoli	31
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahun 2021	34
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja	38
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Tahun 2021	41
Tabel 3.9	Analisa Kinerja Proses Peradilan	43
Tabel 3.10	Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan	45
Tabel 3.11	Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	45
Tabel 3.12	Presentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan.....	46
Tabel 3.13	Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	46
Tabel 3.14	Presentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan.....	47
Tabel 3.15	Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	48
Tabel 3.16	Penyelesaian Perkara Perdata.....	49
Tabel 3.17	Presentase sisa Perkara pidana yang diselesaikan tepat Waktu	49
Tabel 3.18	Penyelesaian Perkara Pidana	50
Tabel 3.19	Perbandingan Presentase Perkara Pidana yang diselesaikan	51
Tabel 3.20	Presentase Penurunan sisa Perkara	52
Tabel 3.21	Keadaan Sisa Perkara Perdata Tahun 2021	52
Tabel 3.22	Presentase Penurunan sisa Perkara perdata	53
Tabel 3.23	Sisa Perkara Pidana Tahun 2021	54
Tabel 3.24	Presentase Penurunan sisa Perkara pidana	55
Tabel 3.25	Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	56
Tabel 3.26	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.....	56

Tabel 3.27	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	56
Tabel 3.28	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	57
Tabel 3.29	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum banding	58
Tabel 3.30	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum kasasi...	58
Tabel 3.31	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum PK	59
Tabel 3.32	Presentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi..	60
Tabel 3.33	Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	60
Tabel 3.34	Presentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	61
Tabel 3.35	Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	62
Tabel 3.36	Perbandingan Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	62
Tabel 3.37	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	63
Tabel 3.38	Keadaan Perkara yang di putus Tahun 2021	64
Tabel 3.39	Perbandingan presentase isi putusan yang di terima tepat waktu ...	65
Tabel 3.40	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	66
Tabel 3.41	Keadaan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021	66
Tabel 3.42	Perbandingan Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi..	67
Tabel 3.43	Indikator Kinerja Perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk Secara tepat waktu	68
Tabel 3.44	Keadaan perkara perdata banding, kasasi dan PK tahun 2021	69
Tabel 3.45	Perbandingan Presentase Berkas perkara banding, kasasi, PK Yang di ajukan tepat waktu	69
Tabel 3.46	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat ...	71
Tabel 3.47	Keadaan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online	71
Tabel 3.48	Perbandingan Keadaan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online	72

Tabel 3.49	Sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan terpinggirkan	73
Tabel 3.50	Presentase Perkara prodeo yang diselesaikan	74
Tabel 3.51	Keadaan Jumlah perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Tolitoli	74
Tabel 3.52	Presentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan ...	75
Tabel 3.53	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	76
Tabel 3.54	Perbandingan keadaan perkara yang diselesaikan di luar Gedung ..	76
Tabel 3.55	Persentase Pencari keadilan golongan tertentu mendapat bantuan Hukum (posbakum)	77
Tabel 3.56	Pencari keadilan golongan tertentu mendapat Layanan bantuan hukum (posbakum)	77
Tabel 3.57	Perbandingan Keadaan jumlah Pencari keadilan golongan tertentu mendapat Layanan bantuan hukum (posbakum)	78
Tabel 3.58	Sasaran Strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	79
Tabel 3.59	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	79
Tabel 3.60	Perbandingan Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	80
Tabel 3.61	Rincian Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021	82
Tabel 3.62	Rincian Realisasi Belanja barang Operasional dan non operasional tahun 2021 DIPA 01	83
Tabel 3.63	Rincian Realisasi Belanja modal tahun 2021	86
Tabel 3.64	Realisasi Anggaran DIPA 01	86
Tabel 3.65	Rincian Realisasi Anggaran DiIPA 03 tahun 2021	88
Tabel 3.66	Realisasi Anggaran DIPA 01	89

DAFTAR GAMBAR dan GRAFIK

Gambar 1.1	SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)	2
Gambar 1.2	Website Pengadilan Negeri Tolitoli	3
Gambar 1.3	Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	3
Gambar 1.4	Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI	4
Gambar 1.5	Aplikasi OM PENTOL	5
Gambar 1.6	Aplikasi EL SAPTO	5
Gambar 1.7	PTSP Pengadilan Negeri Tolitoli	6
Gambar 1.8	Pojok e-Court Pengadilan Negeri Tolitoli	6
Gambar 1.9	Eraterang	7
Gambar 1.10	Survey	7
Gambar 1.11	Sertifikat Akreditasi BADILUM	8
Gambar 1.12	Sertifikat Peringkat I Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi pada Kategori Peradilan Umum Kelas II	9
Gambar 1.13	Sertifikat Peringkat I Capaian IKPA Pagu Kecil Tahun Anggaran 2021	9
Gambar 1.14	Struktur Organisasi	13
Gambar 1.15	Grafik Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli	14
Gambar 3.16	Grafik sisa perkara perdata yang diselesaikan	46
Gambar 3.17	Grafik presentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	47
Gambar 3.18	Grafik presentase Perkara perdata yang siselesaikan tepat Waktu.	50
Gambar 3.19	Grafik presentase Perkara pidana yang siselesaikan tepat Waktu...	51
Gambar 3.20	Grafik Presentase penurunan sisa perkara perdata	53
Gambar 3.21	Grafik Presentase penurunan sisa perkara pidana	55
Gambar 3.22	Grafik Presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding	58
Gambar 3.23	Grafik presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi	58

Gambar 3.24	Grafik presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum PK	59
Gambar 3.25	Grafik presentase perkara pidana yang diselesaikan dengan Diversi	61
Gambar 3.26	Grafik Pencari keadilan yang puas terhadap Layanan peradilan ...	62
Gambar 3.27	Grafik isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	65
Gambar 3.28	Grafik perkara yang diselesaikan melalui mediasi	67
Gambar 3.29	Grafik presentase berkas perkara yang diajukan Bading, kasasi dan PK secara tepat waktu	70
Gambar 3.30	Grafik presentase putusan perkara yang menarik Perhatian yg dapat diakses secara online	72
Gambar 3.31	Grafik presentase perkara prodeo yang diselesaikan	75
Gambar 3.32	Grafik presentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	76
Gambar 3.33	Grafik Presentase pencari keadilan Yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	78
Gambar 3.34	Grafik presentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)....	80
Gambar 3.35	Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01	87
Gambar 3.36	Grafik Realisasi Anggaran DIPA 03	87

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Tolitoli diukur berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana terdapat dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021.



Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban guna memberikan penjelasan mengenai progres (hasil yang dicapai) dari target yang telah ditentukan dalam Tahun 2021.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, terdapat 4 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebesar **83,17%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %	88,89% 99,84%	88,89% 99,84%
		c Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	-3,5% 85,71%	-3,5% 85,71%
		d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %	92,86% 95,24% 98,10%	92,86% 95,24% 98,10%
		e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20%	0 %	0 %
		f Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	93%	93%
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	5,26%	5,26%
		c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d Persentase putusan perkara yang	100 %	100 %	100 %

		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0 %	0 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15 %	0 %	0 %

Anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2021 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03. Untuk Tahun anggaran 2021 Alokasi DIPA 01 sebesar **Rp.4.194.984.000,-** dan DIPA 03 sebesar **Rp.76.260.000,-**.

Pencapaian kinerja dari sisi penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- ✓ Realisasi belanja Negara pada TA 2021 untuk DIPA 01 adalah sebesar Rp.4.166.406.809,- atau mencapai 99,32% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.4.194.984.000,-.
- ✓ Realisasi belanja Negara pada TA 2021 untuk DIPA 03 adalah sebesar Rp.74.197.500,- atau mencapai 97,30% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.76.260.000,-.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tolitoli mempunyai visi : ***"Terwujudnya Badan Peradilan Tolitoli Yang Agung"*** Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Tolitoli dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya/terselenggaranya Good Governance, sebagai mana tertuang dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum

4. Asas Keterbukaan

Upaya Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mewujudkan terselenggaranya Good Governance, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2021 yang sistematis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP itu sendiri merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Tolitoli program prioritas antara lain:

1. Keterbukaan Informasi

- a. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dimana dalam aplikasi tersebut telah dapat dilihat transparansi perkara yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli.

Gambar 1.1 SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

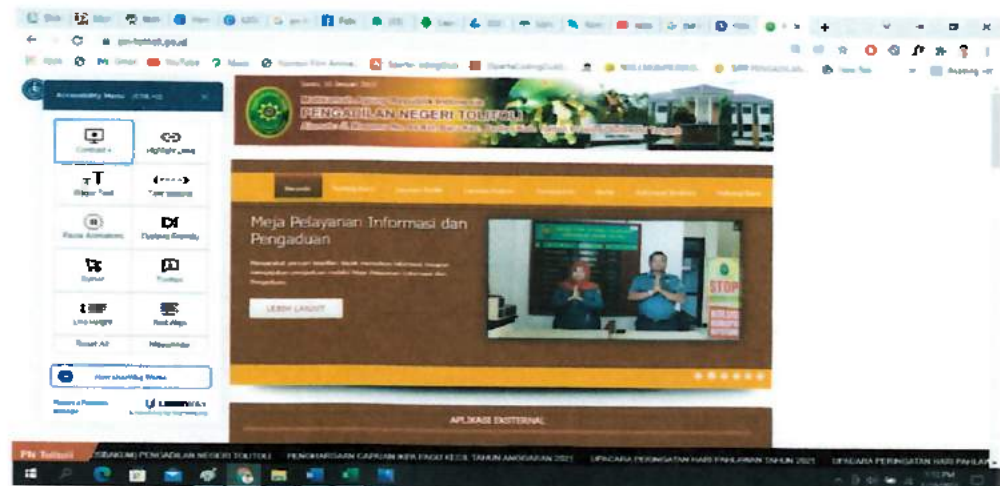
Sistem Informasi Penelusuran Perkara

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

No	Kategori	Sub Kategori	Jenis Perkara	Status Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Reminder	Jumlah Penyelesaian	Jumlah Penyelesaian Reminder	Jumlah Penyelesaian Reminder	Jumlah Penyelesaian Reminder
1	Perkara				1000000					
2	Perkara Reminder				1000000					
3	Perkara Penyelesaian				1000000					
4	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
5	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
6	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
7	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
8	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
9	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
10	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
11	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
12	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
13	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
14	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
15	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
16	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
17	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
18	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
19	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
20	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
21	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
22	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
23	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
24	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
25	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
26	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
27	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
28	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
29	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
30	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
31	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
32	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
33	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
34	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
35	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
36	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
37	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
38	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
39	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
40	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
41	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
42	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
43	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
44	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
45	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
46	Perkara Penyelesaian Reminder				1000000					
47	Perkara Penyelesaian Reminder									

- b. Untuk mengakses SIPP para Pencari keadilan dapat mengakses melalui Website Pengadilan Negeri Tolitoli www.pn-tolitoli.go.id. Selain informasi perkara website tersebut juga menyediakan informasi tentang Pengadilan Negeri Tolitoli.

Gamabar 1.2 Website Pengadilan Negeri Tolitoli



- c. Adanya website Direktori Putusan, dimana website tersebut dapat di akses oleh para pencari keadilan untuk melihat dan mendownload Putusan yang diinginkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Tolitoli.

Gambar 1.3 Website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI



- d. Diimplementasikannya aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI dimana para pencari keadilan yang dalam hal ini masyarakat baik Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) dapat mendaftarkan, membayar dan melakukan panggilan (relaas) secara elektronik, sehingga tidak perlu datang ke pengadilan.

Gambar 1.4 Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI



- e. Dalam rangka memudahkan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Tolitoli, maka Pengadilan Negeri Tolitoli membuat suatu aplikasi yaitu:
- OM PENTOL (Online Messenger Pengadilan Negeri Tolitoli) adalah virtual assistant yang dapat dihubungi melalui WhatsApp. OM PENTOL menyediakan layanan - layanan seperti seputar jadwal sidang, informasi e-tilang, kirtik dan saran untuk Pengadilan Negeri Tolitoli dan layanan lainnya.

Gambar 1.5 Aplikasi OM PENTOL



- Aplikasi EL-SAPTO (Elektronik Sistem Administrasi Pengadilan Negeri Tolitoli) adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses dengan QR Code yang tertera diatas. EL SAPTO melayani pengajuan permohonan bagi para pencari keadilan secara online seperti Permohonan salinan putusan/penetapan, Permohonan informasi public, Permohonan izin/persetujuan penggeledahan, Permohonan izin/persetujuan penyitaan, Permohonan perpanjangan penahanan kepolisian, Permohonan perpanjangan penahanan kejaksaan, Permohonan pinjam barang bukti, Permohonan pembantaran dan Permohonan izin besuk.

Gambar 1.6 Aplikasi EL SAPTO



2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

a. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

PTSP yang dilengkapi dengan sistem antrian yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada terhadap pencari keadilan untuk memperoleh produk-produk pengadilan.

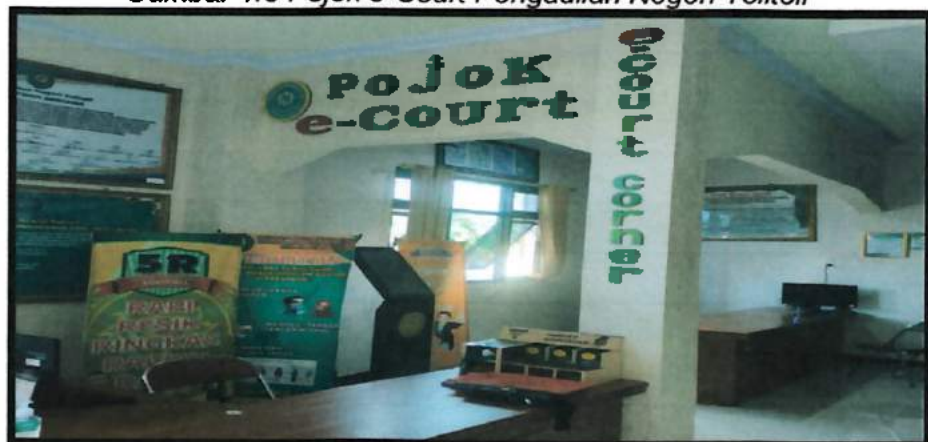
Gambar 1.7 PTSP Pengadilan Negeri Tolitoli



b. Pojok E-Court

Yang merupakan pemanfaatan media informasi edukasi tentang aplikasi e-Court yang meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons dan e-Litigasi. Selain itu Pojok e-Court juga membantu para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Tolitoli.

Gambar 1.8 Pojok e-Court Pengadilan Negeri Tolitoli



c. Eraterang

Yang memberikan pelayanan surat keterangan secara Online kepada masyarakat.

Gambar 1.9 Eraterang



d. Survey

Untuk mengukur kinerja layanan kepada masyarakat Pengadilan Negeri Tolitoli telah mengadakan survey dengan beberapa macam diantaranya dengan menggunakan perangkat computer di meja PTSP.

Gambar 1.10 Survey



Pengadilan Negeri Tolitoli juga telah berhasil melakukan Pembinaan Interna dan Eksternal serta optimalisasi dalam hal pelayanan, penanganan dan penyelesaian perkara, hal tersebut dapat dilihat dari prestasi yang telah diraih dengan mendapatkan penghargaan berupa:

- a. Akreditasi dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan predikat A Excelent.

Gambar 1.11 Sertifikat Akreditasi BADILUM



- b. Penghargaan Peringkat I sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi pada Kategori Peradilan Umum Kelas II .

Gambar 1.12 *Sertifikat Peringkat I Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi pada Kategori Peradilan Umum Kelas II*



- c. Penghargaan Peringkat I Capaian IKPA Pagu Kecil Tahun Anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan.

Gambar 1.13 *Sertifikat Peringkat I Capaian IKPA Pagu Kecil Tahun Anggaran 2021*



2. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Tolitoli dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan akibat adanya mutasi atau promosi keluar pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli namun tidak di imbangi dengan mutas masuk ke Pengadilan Negeri Tolitoli.
2. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tolitoli menyangkut belanja modal untuk pengadaan Alat Cetak (Printer), Laptop dan sarana pendukung SIPP, serta perawata/pemeliharaan tidak mencukupi.
3. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Tolitoli perlu penggantian sebab kendaraan dinas tersebut sebagian tidak layak pakai karena usia kendaraan dan telah memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan, hal mana

dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Tolitoli adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Tolitoli berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Tolitoli terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. FUNGSI

Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tolitoli mempunyai fungsi, sebagai berikut ini:

1) Fungsi Mengadili (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi Nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (1)).

- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administrasi

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/tatalaksanaan, dan keuangan/umum/perlengkapan).

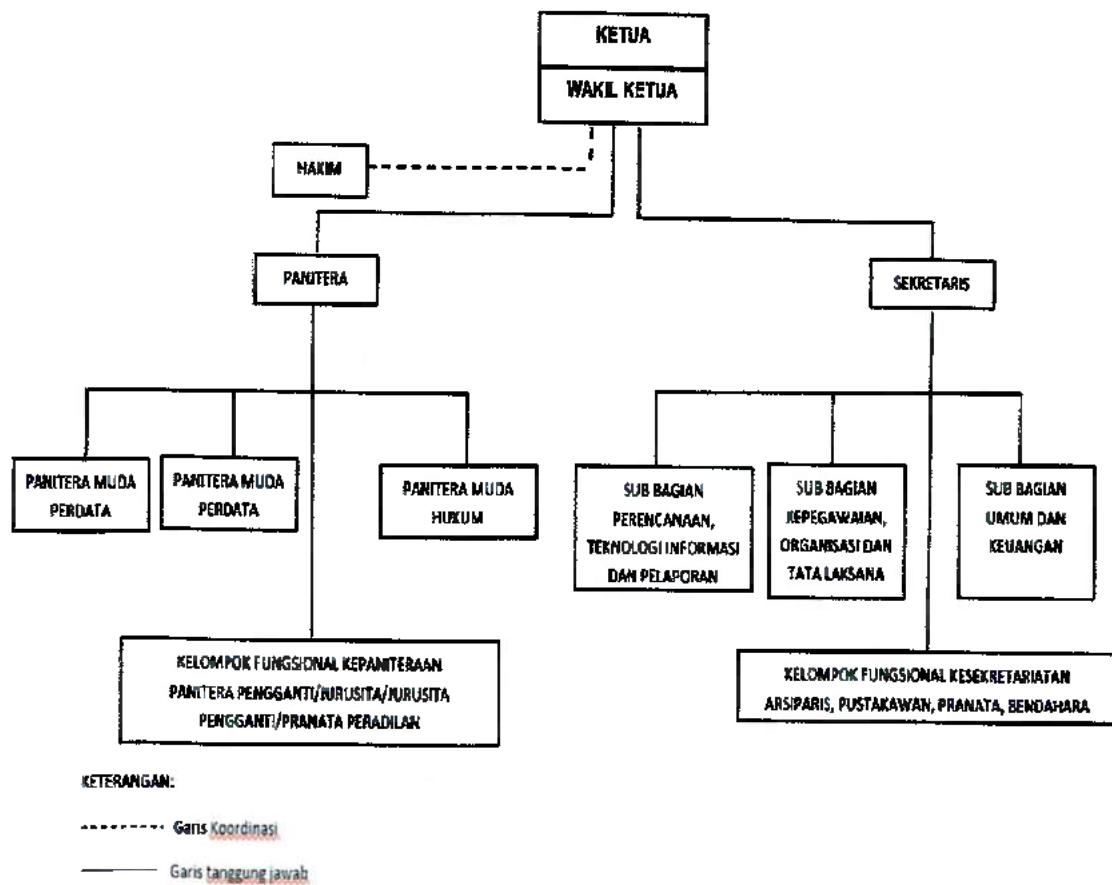
4) Fungsi lain

Antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI dan DUKUNGAN SDM

Berikut ini akan digambarkan Struktur Organisasi yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli:

Gambar 1.14 Struktur Organisasi



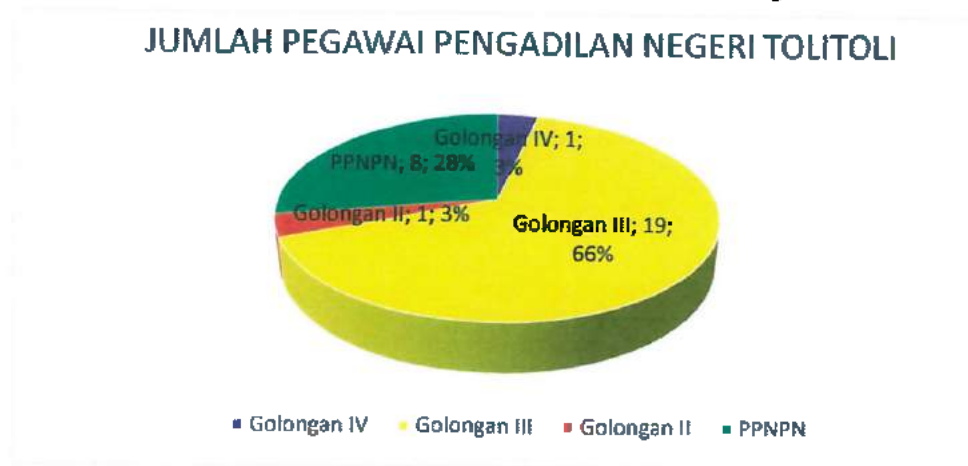
Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli seluruhnya berjumlah dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	
3	Golongan II	1
4	Tenanga Honorer	

Gambar 1.15 Grafik Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli



Jumlah Tenaga Teknis

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Teknis

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Ketua	1
2	Hakim	7
3	Panitera	1
4	Panitera Muda Pidana	1
5	Panitera Muda Perdata	-
6	Panitera Muda Hukum	1
7	Panitera Pengganti	3
8	Jurusita	1

Jumlah Tenaga Non Teknis

Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Non Teknis

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Sekretaris	1
2	Kepala Sub Bagian Umum Keuangan	1
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
5	Pranata Komputer (CPNS)	1
6	Arsiparis (CPNS)	1

Uraian Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan Perma 7 Tahun 20215 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan kesekretariatan peradilan adalah sebagai berikut:

Tugas Dan Wewenang Ketua:

1. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.
2. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
3. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan biaya Kejurusitaan termasuk biaya eksekusi.
5. Menetapkan, pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, pertimbangan putusan yang dilampirkan namun tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan.

6. Melaksanakan putusan serta merta:
 - Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi.
 - Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Mahkamah Agung.
7. Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
8. Menetapkan panjar biaya perkara.
9. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
10. Mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
11. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan.
12. Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan " teguran " (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.
13. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan.
14. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
15. Memerintahkan pelaksanaan lelang.
16. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim–Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
17. Menetapkan/menentukan hari – hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat.
18. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan.
19. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan.

20. Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan.
21. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu.
22. Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan kasasi kepada terdakwa /pemohon banding atau kasasi.
23. Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat, cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya.
24. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang – undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara.
25. Menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses.
26. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodik.

Tugas Dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan.

1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian perkara permohonan.
3. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pendelegasian wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian yang merata kepada semua Hakim

Tugas Dan Wewenang Hakim:

1. Menetapkan hari sidang.
2. Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
3. Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum hari sidang berikutnya.
4. Dalam hal Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk

mendengar sendiri para pihak dan saksi maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani.

5. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
6. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
7. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya.
9. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.
10. Menetapkan hari sidang untuk perkara acara biasa.
11. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis tahananannya.
12. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
13. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
14. Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
15. Memproses permohonan grasi.
16. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan.
17. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi dan eksekusi serta melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan.
18. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Tugas Dan Wewenang Panitera:

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
2. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.

3. Menyusun berita acara persidangan.
4. Memberitahukan putusan verstek atau putusan diluar hadir.
5. Membuat salinan putusan.
6. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
7. Pemungutan biaya – biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara.
8. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
9. Melegalisir surat – surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
10. Menerima surat kuasa khusus.
11. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
12. Melaksanakan ,mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan/ diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.
13. Membuat akta- akta.
14. Bertanggungjawab atas pengelolaan berkas perkara, dokumen putusan, akta, buku register, barang bukti, surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
15. Menerima serta membuat register semua perkara dan permohonan grasi diterima di Kepaniteraan.
16. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding ,kasasi , atau peninjauan Kembali.
17. Mengirimkan berkas permohonan grasi ke Kejaksaan Negeri.
18. Menyerahkan arsip berkas perkara dan akta kepada Panitera Muda Hukum.

Tugas Dan Wewenang Sekretaris:

1. Memaraf surat-surat keluar (termasuk Surat Tugas) yang akan ditandatangani Ketua / Wakil Ketua.
2. Menanda-tangani surat-surat keluar berkenaan dengan bidang Kesekretariatan.
3. Mendisposisi surat-surat masuk untuk didistribusikan ke Sub Bagian sebagai Unit Pengelola (untuk ditindak lanjuti)

4. Melakukan penilaian terhadap bawahan terkait dengan pembuatan SKP
5. Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6. Melaksanakan fungsi Pengawasan Internal di bidang Kesekretariatan.
7. Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran
 - Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
 - Pelaksanaan Urusan Keuangan
 - Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana
 - Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik
 - Pelaksanaan Urusan Surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tolitoli.
8. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran:
 - Menanda-tangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
 - Melakukan pengendalian atas pelaksanaan program agar dilaksanakan secara efektif dan efisien
 - Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada dibawah koordinasinya kepada Sekretaris MARI selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis MARI
 - Menyampaikan LRA dan Neraca setiap bulan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Eselon I dan Kantor Wilayah Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya
 - Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
 - Melaksanakan tugas terkait Pengadaan Barang/ Jasa
 - a. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- b. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- c. Menetapkan PPSPM
- d. Menetapkan bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan
- Menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam pedoman operasional kegiatan sesuai dengan program berdasarkan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam DIPA
- Bertanggung-jawab terhadap keberhasilan program yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis (Renstra) MA dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan
- Secara morai dan material bertanggung-jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang terhadap pelaksanaan program yang berada dalam penguasaannya
- Menanda-tangani administrasi pembukuan bendahara pengeluaran
- Menanda-tangani Berita Acara Rekonsiliasi SAI
- Menanda-tangani SK tentang lembur/ honor/vakasi
- Melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tugas Dan Wewenang Panitera Muda Perdata:

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perdata
3. Mengembalikan berkas surat permohonan / surat gugatan serta dokumen – dokumen terkait yang belum lengkap dengan melampirkan daftar periksa supaya pemohon / penggugat atau kuasanya dapat melengkapi surat – surat sesuai dengan kekurangannya.
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM)

5. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
6. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register disertai catatan singkat tentang isinya.
7. Menyiapkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
9. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
10. Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara perdata.
11. Membuat Laporan Perkara Perdata pada setiap bulannya.

Tugas Dan Wewenang Panitera Muda Pidana:

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan termasuk barang bukti dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara pidana.
3. Memberi nomor register kepada setiap perkara pidana yang diterima di Kepaniteraan.
4. Memberi nomor register kepada setiap perkara dengan acara singkat.
5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
7. Menyiapkan berkas permohonan grasi.
8. Menyerahkan arsip berkas perkara /permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.
9. Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara pidana.
10. Membuat Laporan Perkara Pidana pada setiap bulannya.

Tugas Dan Wewenang Panitera Pengganti:

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera muda yang bersangkutan.
2. Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
3. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang.
4. Membuat penetapan sita jaminan.
5. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
6. Melaporkan kepada Panitera muda untuk dicatat dalam register perkara mengenai penundaan hari – hari sidang, perkara yang sedang putus berikut amar putusannya.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda bila sudah selesai diminutasi.
8. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.
9. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
10. Melaporkan barang bukti kepada Panitera.
11. Melaporkan kepada Panitera muda pidana mengenai penundaan hari sidang.
12. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera muda pidana, perdata, bila telah selesai dimunitasi.
13. Mengisi SIPP setiap ada perkembangan dalam proses perkara yang ditangani.

Tugas Dan Wewenang Juru Sita:

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera.
2. Menyampaikan pengumuman–pengumuman, teguran–teguran, protes–protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut ketentuan undang – undang

3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan dengan teliti melihat lokasi batas- batas tanah yang disita beserta surat – suratnya yang sah apabila menyita tanah.
4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kepada badan pertanahan nasional setempat.
5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
6. Melaksanakan tugas di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Tugas Dan Wewenang Kepala Sub-Bagian Umum Keuangan:

1. Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi tata persuratan.
2. Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi perlengkapan kantor.
3. Mengawasi dan bertanggung jawab tentang administrasi kerumah tanggaan kantor.
4. Bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kondisi inventaris barang.
5. Menghimpun administrasi perencanaan.
6. Membagi tugas masing – masing staf sub bagian umum yang telah ditentukan sesuai dengan jobdesk masing – masing.
7. Mengawasi penyelesaian tugas di sub bagian umum agar sesuai target yang telah ditentukan sesuai dengan SOP.
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada staff Sub umum dan Keuangan.
9. Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana.
10. Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum dan keuangan setiap awal tahun.
11. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara.
12. Melakukan pengawasan anggaran terhadap pelaporan dan penatausahaan Buku Kas dan Buku Pembantu pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.

13. Meneliti dan memaraf Laporan Realisasi Anggaran secara manual DIPA 01 dan 03
14. Meneliti dan memaraf Laporan PNPB pertanggung jawaban Bendahara Penerima.
15. Mengadakan rapat dinas / koordinasi dengan bawahan.
16. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.
17. Menyampaikan saran / usul kepada atasan.
18. Mengevaluasi prestasi kerja pada bawahan.
19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Tugas Dan Wewenang Kepala Sub-Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana:

1. Bertanggung jawab pada pengadaan Pegawai (formasi, penerimaan dan pengangkatan).
2. Bertanggung jawab pada tata usaha kepegawaian (izin, dispensasi, surat – surat keterangan).
3. Bertanggung jawab pada penilaian dan hukuman (surat-surat yang berkenaan dengan penilaian dan hukuman).
4. Bertanggung jawab pada pembinaan mental (surat – surat yang berkenaan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalam pembinaan kerohanian).
5. Bertanggung jawab pada mutasi (kepangkatan, kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja, penyesuaian tunjangan keluarga, alih tugas jabatan struktural dan fungsional).
6. Bertanggung jawab pada kesejahteraan (kesehatan, cuti, rekreasi dan olahraga, bantuan sosial, koperasi, perumahan, antar jemput dan penghargaan).
7. Bertanggung jawab pada pemutusan hubungan kerja (surat – surat yang berkenaan dengan pensiun pegawai).
8. Bertanggung jawab pada pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

9. Bertanggung jawab pada organisasi dan tata laksana (surat menyurat, uraian pekerjaan, perencanaan, laporan umum, monitoring, evaluasi. Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan, penyusunan prosedur kerja, penyusunan pembaharuan sarana kerja).

Tugas Dan Wewenang Kepala Sub-Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:

A. Perencanaan

1. Melakukan rapat internal pimpinan untuk membahas usulan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya;
2. Meneliti penyusunan TOR dan RAB serta data dukung lainnya serta Penyusunan Rencana Kerja RKA-KL;
3. Menyusun Rencana Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan setiap tahun;
4. Meneliti hasil usulan Rencana Kerja Anggaran sebelum dikirim ke Ketua Pengadilan Tinggi Palu;

B. Teknologi Informasi

1. Pengelolaan Perangkat Keras (Hardware) pendukung Teknologi Informasi
 - Menyusun perencanaan pengembangan / pemeliharaan Perangkat Keras Teknologi Informasi;
 - Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan pengembangan / pemeliharaan Perangkat Keras Teknologi Informasi;
 - Membantu melaksanakan administrasi dan inventarisasi Perangkat Keras Teknologi Informasi mendukung tertib administrasi data Barang Milik Negara yang dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - Mengawasi dan mengevaluasi (serta melaksanakan apabila mampu) pelaksanaan Sosialisasi / Pelatihan / Bantuan cara penggunaan Perangkat Keras Teknologi Informasi

2. Pengelolaan Basis Data dan Perangkat lunak (Software)
3. Pengelolaan Jaringan Komputer
4. Pengelolaan Website dan Media Sosial.

C. Pelaporan

1. Melaksanakan pemantauan atas pengisian data pada Sistem Informasi Pengadilan;
2. Meneliti, mengkoreksi dan memparaf/menandatangani Laporan Bulanan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Meneliti data dan/atau statistik yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengadilan maupun secara manual dari setiap Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk keperluan pembuatan laporan rutin (Laporan Tahunan, LKjIP) maupun laporan insidental atas dasar permintaan
4. Melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Menerima Surat masuk dari bagian umum serta mengkonfirmasi di aplikasi surat masuk.
6. Memutuskan/memberikan petunjuk akan tindak lanjut atas surat masuk.
7. Membuat draft jawaban atas surat masuk apabila surat masuk memerlukan jawaban.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan sistematika laporan sebagai berikut:

Pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

BAB I - Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli dan Struktur Organisasi.

BAB II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menguraikan mengenai Rencana Strategis, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tolitoli, Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli dan Penetapan Kinerja.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Negeri Tolitoli.

BAB IV - Penutup

Menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2020–2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Visi Pengadilan Negeri Tolitoli mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tolitoli Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli

2. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli

3. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

4. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan Visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tolitoli akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

➤ TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai Lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa.
2. Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

➤ SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang akan dicapai adalah atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tolitoli dalam Tahun 2020 – 2024.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021:

Tabel.2.5 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$ Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Catatan: • Tn = Sisa perkara tahun berjalan • Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$ Catatan : • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ Catatan : • Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan 32 edung 32 PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan 32edung.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah Perkara yang putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar 33edung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar 33edung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, 33edung keliling maupun 33edung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar 33edung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021.

Tabel 2.6 Tabel Rencana Kinerja tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Sisa Perkara Perdata secara tepat waktu	100%	Rp. 47.918.000,-
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan: -Perdata -Pidana	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Sisa Perkara Pidana secara tepat waktu	100%	
		c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Perkara Perdata secara tepat waktu	100%	

d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Perkara Pidana secara tepat waktu	100%	
e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	Rp. 700.000,-
f. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan kasasi yang tepat waktu	100%	
g. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan PK yang tepat waktu	100%	Rp. 600.000,-
h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	
i. Index responden pencari keadilan	100%					

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	yang puas terhadap layanan peradilan.					
	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Perkara Perdana secara tepat waktu	100%
	c. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Perkara Perdana secara tepat waktu	100% Rp. 2.500.000,-
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%				
	d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.	100% Rp. 1.300.000,-
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Putusan Perkara Perdana secara tepat waktu	100%

	Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Peradilan Umum			
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%			
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%			
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum 240 Jam Layanan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%			Rp. 24.000.000,-

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja awal tahun 2021. Dalam Penetapan Sasaran Kinerja 2021 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi tujuan strategis pada tahun 2021 serta target yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		b. Persentas Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu:	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara:	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
		a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat	

	Penyelesaian Perkara	waktu:	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Bading, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	15%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.057.484.500.
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 137.500.000.
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 71.918.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %	88,89 % 99,84 %	88,89% 99,84%
		c Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	-3,5% 85,71%	-3,5 % 85,71%
		d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %	92,86% 95,24% 98,10%	92,86% 95,24% 98,10%
		e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %	0 %	0 %
		f Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	93%	93%
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	5,26%	5,26%
		c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%	100 %
		d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %

	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0 %	0 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%	0 %	0 %

Pencapaian tersebut diatas merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Tolitoli selama tahun 2021. Beban Perkara tahun 2021 melonjak jauh jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia tidak ada menambahkan dan justru mengalami pengurangan karena mutasi/pindah tugas ke satker lain. Oleh karena itu terlihat bahwa pencapaian kinerja tidak dapat berhasil dengan baik, terutama pada sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel khususnya penurunan sisa perkara.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada awal Tahun 2021, Pengadilan Negeri Tolitoli telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

**SASARAN
STRATEGIS
I**
**TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelenggaraan proses peradilan di Pengadilan Negeri Tolitoli.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 6 (lima) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi ;

1. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
4. Persentase perkara yang mengajukan Banding, Kasasi, dan PK
5. Persentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja sasarannya pada Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Analisa Kinerja Proses Peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		▪ Perdata	100 %	100 %	100 %
		▪ Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu:			
		▪ Perdata	100 %	88.89 %	88.89 %
		▪ Pidana	100 %	99.84 %	99.84 %

		c. Persentase penurunan sisa perkara:			
		▫ Perdata	100 %	-3,5%	-3,5%
		▫ Pidana	100 %	85,71%	85,71 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		▫ Banding	100 %	92,86%	92,86%
		▫ Kasasi	100%	95,24%	95,24%
		▫ Peninjauan Kembali	100 %	98,10%	98,10%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20 %	0 %	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	93%	93%

Analisa pencapaian masing-masing target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja: a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase sisa perkara yang diselesaikan" pada tahun 2021 serta ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Persentase sisa perkara yang diselesaikan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		▪ Perdata	100 %	100 %	100 %
		▪ Pidana	100 %	100 %	100 %

➤ Perkara Perdata

Jumlah penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Tolitoli di tampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Sisa Perkara Perdata yang di selesaikan

Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020 yang Telah Diselesaikan di Tahun 2021
Perdata Gugatan	2	2
Perdata Gugatan Sederhana	-	-
Perdata Permohonan	-	-
Jumlah	2	2

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan sisa perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2020 dapat diselesaikan di tahun 2021. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja sebesar 100%. Berikut adalah analisis capaian target sisa perkara yang dapat diselesaikan:

$$\text{Persentase sisa perkara yang diselesaikan} = \frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100$$

$$= 100\%$$

Sebagai bahan perbandingan persentase capaian penyelesaian perkara pada empat tahun terakhir sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.12 Daftar Realisasi Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir

Uraian	Realisasi Capaian Kinerja			
	2018	2019	2020	2021
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Gambar 3.16 Grafik sisa Perkara Perdata yang diselesaikan



➤ Perkara Pidana

Jumlah penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Tolitoli di tampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Sisa Perkara Pidana yang di selesaikan

Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020 yang Telah Diselesaikan di Tahun 2021
Pidana Biasa	7	7
Pidana Anak	-	-
Pidana Singkat	-	-
Pidana Ringan	-	-
Pidana Praperadilan	-	-
Pidana Lalu Lintas	-	-
Jumlah	7	7

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan sisa perkara pidana yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2020 dapat diselesaikan di tahun 2021. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja sebesar 100%.

Berikut adalah analisis capaian target sisa perkara yang dapat diselesaikan:

$$\begin{aligned}\text{Persentase sisa perkara yang diselesaikan} &= \frac{7 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan persentase capaian penyelesaian perkara pidana pada empat tahun terakhir sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.14 Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Uraian	Realisasi Capaian Kinerja			
	2018	2019	2020	2021
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Gambar 3.17 Grafik presentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan



Berdasarkan tabel di atas peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebanyak 100% sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, diharapkan sampai dengan akhir tahun 2022 kinerja ini tetap bisa dipertahankan. Keberhasilan pencapaian pada indikator kegiatan ini antara lain dipengaruhi:

- ✓ Adanya fungsi pengawasan melekat dari pimpinan.
- ✓ Peningkatan kualitas pegawai.
- ✓ Para pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan SOP.
- ✓ Pelaksanaan efesiensi dan efektifitas penanganan perkara.

Indikator Kinerja: b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu" pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	b. Persentase perkara perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		▫ Perdata	100 %	88.89 %	88.89 %
		▫ Pidana	100 %	99.84 %	99.84 %

Di bawa ini menggambarkan keadaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2021.

➤ Perkara Perdata

Tingkat Pencapaian Indikator kinerja "Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu" tahun 2021 belum memenuhi terger kinerja. Jumlah perkara perdata yang dapat diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 56 perkara dari jumlah perkara yang di tangani sebanyak 63 perkara. Sehingga presentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 88,89%. Keadaan Perkara Perdata pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.16 Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2021

Jenins Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk Tahun 2021	Perkara yang Putus Tahun 2021	Sisa Perkara Tahun 2021
Perdata Gugatan	2	40	33	9
Perdata Gugatan Sederhana	-	15	15	-
Perdata Permohonan	-	8	8	-
Jumlah	2	63	56	9

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian target kinerja pada indikator "Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu" pada tahun 2021 mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena pada akhir tahun jumlah perkara yang masuk pada tahun 2021 lebih banyak. Berikut adalah analisis capaian target sisa perkara yang dapat diselesaikan:

$$\begin{aligned}\text{Persentase perkara diselesaikan tepat waktu} &= \frac{56}{63} \times 100 \\ &= 88,89\%\end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan capaian Indikator kinerja "Presentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu" pada empat tahun terakhir sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.17 Presentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	89%	100%	92,13%	88,89%	Penurunan

Gambar 3.18 Grafik presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



➤ Perkara Pidana

Tingkat Pencapaian Indikator kinerja "Presentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu" tahun 2021 belum memenuhi target kinerja. Jumlah perkara Pidana yang dapat diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 623 perkara dari jumlah perkara pidana yang di tangani sebanyak 624 perkara. Sehingga presentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 88,89%. Keadaan Perkara Perdata pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2021

Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk Tahun 2021	Perkara yang Putus Tahun 2021	Sisa Perkara Tahun 2021
Pidana Biasa	7	116	122	1
Pidana Anak	-	7	7	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Ringan	-	3	3	-
Pidana Praperadilan	-	1	1	-
Pidana Lalu Lintas	-	490	490	-
Jumlah	7	617	623	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian target kinerja pada indikator "Presentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu" pada tahun 2021 mengalami kenaikan kinerja dibandingkan dengan pada tahun

2020. Berikut adalah analisis capaian target sisa perkara yang dapat diselesaikan:

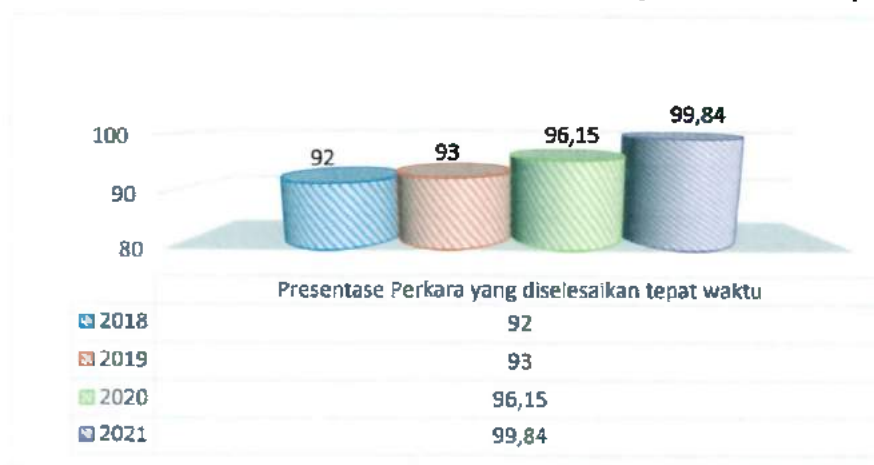
$$\begin{aligned}\text{Persentase perkara pidana diselesaikan tepat waktu} &= \frac{623}{624} \times 100 \\ &= 99,84\%\end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan capaian Indikator kinerja "Presentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu" pada empat tahun terakhir sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.19 Presentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	93%	96,15%	99,84%	Kenaikan

Gambar 3.19 Grafik Presentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu



Indikator Kinerja: c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah sisa perkara yang tahun sebelumnya dikurangkan dengan sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100$$

Keterangan:

T_n = Sisa perkara tahun berjalan

T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Penurunan Sisa Perkara" pada tahun 2021 serta ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Persentase Penurunan Sisa Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Penurunan sisa perkara:			
		▪ Perdata	100 %	-3,5 %	-3,5 %
		▪ Pidana	100 %	85,71%	85,71 %

➤ Perkara Perdata

Tingkat Pencapaian Indikator kinerja "Presentase Penurunan Sisa Perkara" tahun 2021 belum memenuhi terger kinerja, dikarenakan jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2020 sebanyak 2 perkara sedangkan sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 9 perkara. Sehingga presentasi penurunan sisa perkara perdata waktu pada tahun 2021 sebesar -3,5%. Keadaan Perkara Perdata pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.21 Keadaan sisa Perkara Perdata Tahun 2021

Jenins Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk Tahun 2021	Perkara yang Putus Tahun 2021	Sisa Perkara Tahun 2021
Perdata Gugatan	2	40	33	9
Perdata Gugatan Sederhana	-	15	15	-
Perdata Permohonan	-	8	8	-
Jumlah	2	63	56	9

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian target kinerja pada indikator "Presentase Penurunan sisa perkara" pada tahun 2021 mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun lebih banyak. Berikut adalah analisis capaian target sisa perkara yang dapat diselesaikan:

$$\begin{aligned}\text{Presentasi Sisa Perkara} &= \frac{2-9}{2} \times 100 \\ &= -3,5 \%\end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan capaian Indikator kinerja "Presentase Penurunan sisa perkara" pada empat tahun terakhir sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.22 Presentase Penurunan Sisa Perkara Perdata

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase Penurunana Sisa Perkara Perdata	28,6%	0%	60 %	-3,5%	Penurunan

Gambar 3.20 Grafik presentase penurunan sisa perkara perdata



➤ Perkara Pidana

Tingkat Pencapaian Indikator kinerja "Presentase Penurunan Sisa Perkara Pidana" tahun 2021 sudah memenuhi terger kinerja, dikarenakan jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2020 sebanyak 7 perkara sedangkan sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara. Sehingga presentasi penurunan sisa perkara perdata waktu pada tahun 2021 mencapai 85,71%. Keadaan Perkara Pidana pada tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.23 Sisa Perkara Pidana Tahun 2021

Jenis Perkara	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2020	Perkara Masuk Tahun 2021	Perkara yang Putus Tahun 2021	Sisa Perkara Tahun 2021
Pidana Biasa	7	116	122	1
Pidana Anak	-	7	7	-
Pidana Singkat	-	-	-	-
Pidana Ringan	-	3	3	-
Pidana Praperadilan	-	1	1	-
Pidana Lalu Lintas	-	490	490	-
Jumlah	7	617	623	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian terget kinerja pada indikator "Presentase Penuruan sisa perkara Pidana" pada tahun 2021 mengalami kenaikan kinerja dibandingkan dengan pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih cepat dapat memperoleh keadilan. Berikut adalah analisis capaian target sisa perkara yang dapat diselesaikan:

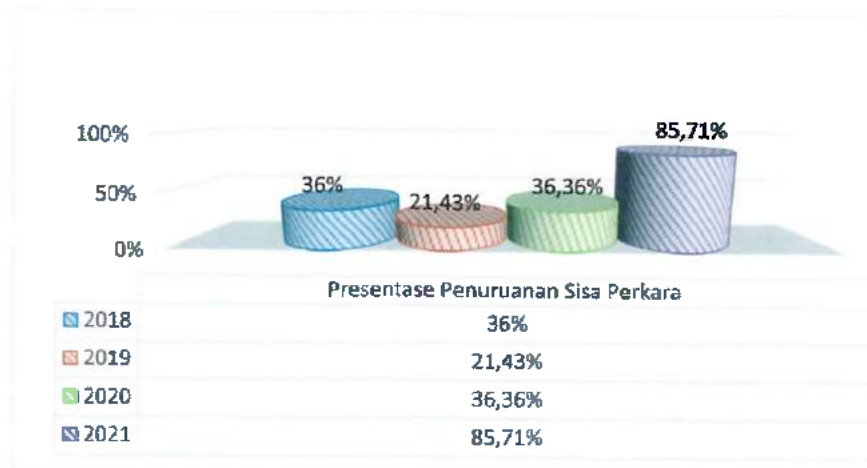
$$\begin{aligned}
 \text{Presentasi Sisa Perkara} &= \frac{7-1}{7} \times 100 \\
 &= 85,71 \%
 \end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan capaian Indikator kinerja "Presentase Penurunan sisa perkara" pada empat tahun terakhir sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.24 Presentase Penurunan Sisa Perkara Pidana

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	Keterangan
Presentase Penurunan Sisa Perkara Pidana	36%	21,43%	36,36%	85,71%	Kenaikan

Gambar 3.21 Grafik presentase penurunan sisa perkara pidana



Indikator Kinerja: d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi, dan PK

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan, antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$$

Keterangan:

- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK.
- Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum" pada tahun 2021 serta ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		▫ Banding	100%	92,86%	92,86%
		▫ Kasasi	100%	95,24%	95,24%
		▫ PK	100 %	98,10%	98,10%

Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2021 yang tidak mengajukan upaya hukum.

Tabel 3.26 Perkara yang tidak Upaya Hukum Banding

Jenis Perkara	Jumlah Putusan PN Tahun 2021	Perkara Bading	Jumlah Perkara yang tidak upaya hukum banding
Perdata	77	4	73
Pidana	133	11	122
Jumlah	210	15	195

Tabel 3.27 Perkara yang tidak Upaya Hukum Kasasi

Jenis Perkara	Jumlah Putusan PN Tahun 2021	Perkara Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak upaya hukum Kasasi
Perdata	77	1	76
Pidana	133	9	124
Jumlah	210	10	200

Tabel 3.28 Perkara yang tidak Upaya Hukum PK

Jenis Perkara	Jumlah Putusan PN Tahun 2021	Perkara PK	Jumlah Perkara yang tidak upaya hukum PK
Perdata	77	1	76
Pidana	133	3	130
Jumlah	210	4	206

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Banding} &= \frac{195}{210} \times 100 \\ &= 92.86\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kasasi} &= \frac{200}{210} \times 100 \\ &= 95.24\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PK} &= \frac{206}{210} \times 100 \\ &= 98.10\%\end{aligned}$$

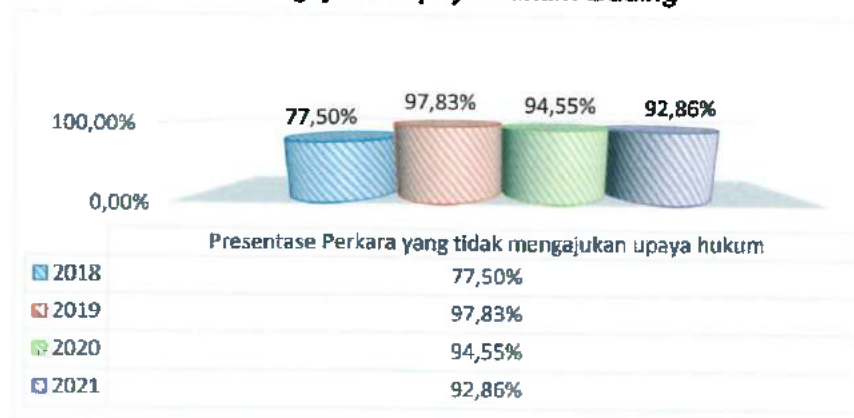
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian target kinerja pada indikator "Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum" pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bading sebanyak 92,86%, Kasasi sebanyak 95,24% dan PK sebanyak 98,10%. menunjukkan bahwa adanya mengalami Penurunan kinerja dibandingkan dengan pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya ketidak puasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli.

Sebagai bahan perbandingan Pencapaian target Indikator kinerja "Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum" pada empat tahun terakhir sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.29 Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bading

Indikator Kinerja	Pencapaian Target kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bading	97%	92%	94,55%	92,86%	Penurunan

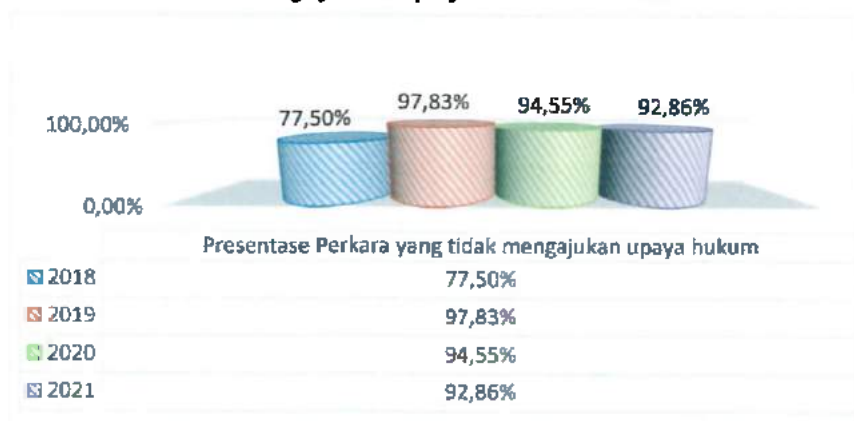
Gambar 3.22 Grafik Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Bading



Tabel 3.30 Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Pencapaian Target kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97%	93%	98,44%	95,24%	Penurunan

Gambar 3.23. Grafik Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi



Tabel 3.31 Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Indikator Kinerja	Pencapaian Target kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	99%	99,22%	92,86%	Penurunan

Gambar 3.24 Grafik Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK



Indikator Kinerja: e. Persentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi dengan jumlah perkara pidana anak, yang difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100$$

Keterangan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.

Target indikator kinerja Presentasi perkara Pidana anak yang diselesaikan

dengan Diversi pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 20%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Presentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.32 Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	20%	0%	0%

Tingkat Pencapaian Indikator kinerja “Presentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi” tahun 2021 belum memenuhi target kinerja, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga masa depan anak baik sebagai saksi maupun sebagai korban. Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan perkara Diversifikasi pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2021

Tabel 3.33 Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021

Total Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi
7	0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui realisasinya sebagai berikut:

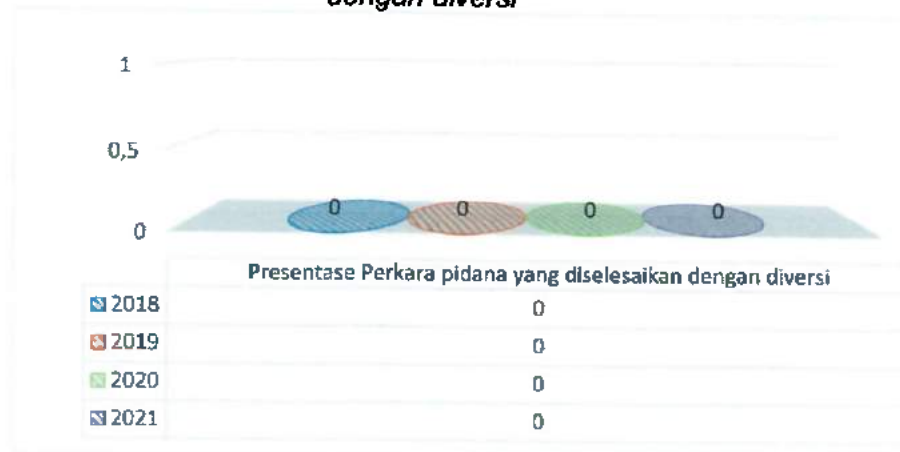
$$\begin{aligned}\text{Perkara diversifikasi} &= \frac{0}{7} \times 100 \\ &= 0 \%\end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan Pencapaian target Indikator kinerja “Presentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi” pada tiga tahun terakhir sebagaimana pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.34 Presentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator Kinerja	Pencapaian Target kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	0%	0%	0%	-

Gambar 3. 25 Grafik perbandingan perkara pidana yang diselesaikan dengan diversi



Indikator Kinerja: f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja index kepuasan Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan yang di berikan di Pengadilan Negeri Tolitoli.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Tolitoli pada bulan Desember 2021 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tolitoli sebesar 93 %.

Tabel 3.35 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

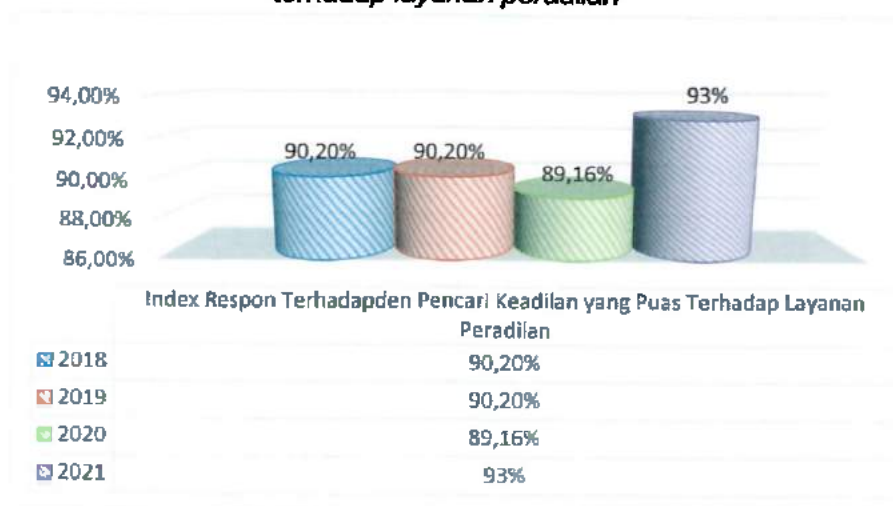
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	f. Perse Indikator Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%	93%	93%

Tabel dan grafik di bawah ini merupakan perbandingan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Tolitoli.

Tabel 3.36 Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Uraian	Pencapaian Target Kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Hasil Survei Index Kepuasan Masyarakat	90,2%	90,2%	89,16%	93%	Kenaikan

Gambar 3.26 Grafik index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



**SASARAN
STRATEGIS
II**
**PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA**

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 4 indikator yaitu:

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu.
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi.
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Indikator kinerja sasaran pada Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.37 Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
2	Peningkatan Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	5,26%
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	100 %	100 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja: a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$$

Tingkat Pencapaian Indikator kinerja "Presentase isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu" tahun 2021 telah memenuhi target kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2021 telah tercapai dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran jajaran kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai dengan SOP di kepaniteraan.

Berikut ini adalah daftar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Tolitoli pada Tahun 2021 dan Putusan yang disampaikan tepat waktu.

Tabel 3.38 Perkara Yang Diputus Tahun 2021

Jenis Perkara	Perkara yang di Putus	Putusan yang di Sampaikan Tepat Waktu
Perdata		
Perdata Gugatan	56	56
Perdata Gugatan Sederhana	15	15
Perdata Permohonan	6	6
Pidana		
Pidana Biasa	122	122
Pidana Anak	7	7
Pidana Singkat	-	-
Pidana Ringan	3	3
Pidana Praperadilan	1	1
Pidana Lalu Lintas	490	490
Jumlah	700	700

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2021 sebanyak 700 perkara dan putusan tersebut semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

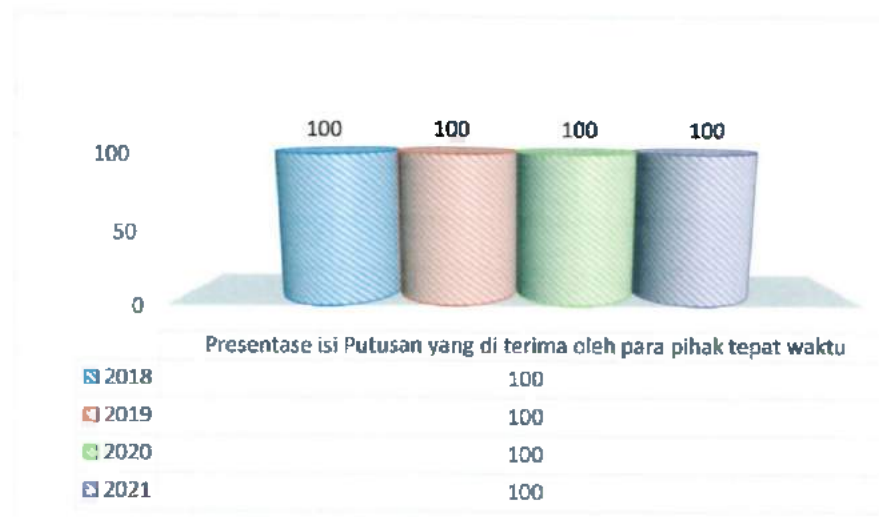
$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{700 \text{ Perkara}}{700 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan Pencapaian target Indikator kinerja "Presentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu" sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.39 Perbandingan Presentase isi Putusan yang di terima para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	Stabil

Gambar 3.27 Grafik presentase isi putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu



Indikator Kinerja: b.Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.40 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
2.	Peningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	5,26%	5,26%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 19 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diproses pada tahun 2021 sebanyak 19 perkara, yang tidak diproses mediasi sebanyak 18 perkara.

Tabel 3.41 keadaan perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021

No	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Perkara Perdata Gugatan yang masuk	40
2.	Perkara Perdata Gugatan yang dilakukan mediasi	19
3.	Mediasi berhasil (akta perdamaian)	1
4	Mediasi Gagal	18

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 sebanyak 1 perkara yaitu sebesar 5,26%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keuntungan jika perkara diselesaikan melalui mediasi. Berikut adalah analisis capaian target perkara yang diselesaikan melalui mediasi:

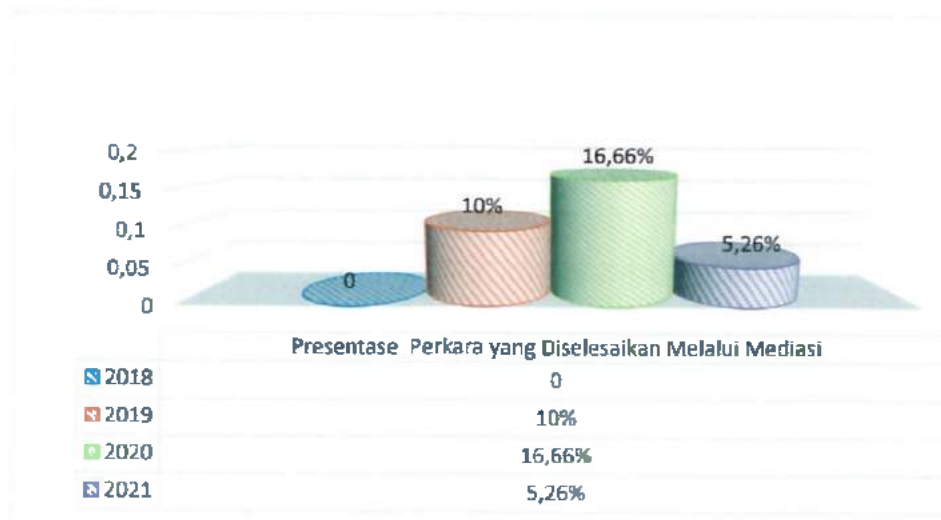
$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{1 \text{ Perkara}}{19 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= 5,26\%\end{aligned}$$

Sebagai bahan perbandingan Pencapaian target Indikator kinerja "Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi" sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.42 Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui mediasi

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0%	10%	16,66%	5,26%	Penurunan

Gambar 3.28 Grafik presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi



Indikator Kinerja: c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100$$

Realisasi Indikator kinerja sasarannya pada Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.43 Indikator Kinerja Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
2.	Peningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Tingkat Pencapaian Indikator kinerja "Presentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu" tahun 2021 telah memenuhi terger kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2021 telah tercapai.

Realisasi dan capaian indikator kinerja "persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.44 Perkara Perdata banding, Kasasi, PK Tahun 2021

Upaya Hukum	Perkara Yang Dimohonkan	Perkara yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
Perdata		
Banding	4	4
Kasasi	1	1
PK	1	1
Pidana		
Banding	11	11
Kasasi	9	9
PK	3	3
Jumlah	29	29

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 29 Perkara. Perhitungan analisis realisasinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{29}{29} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Adapun perbandingan Pencapaian target Indikator kinerja Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan Tepat Waktu sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.45 Presentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Presentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	Stabil

Gambar 3.29 Grafik Presentase Berkas Perkara Perdata yang diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu



Indikator Kinerja: d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Putusan Perkara menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dengan Jumlah Perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online yang diputus, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online}}{\text{Jumlah Perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online diputus}} \times 100$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus” pada tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel 3.46 Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2020
2.	Peningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	d Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja *Access To Justice* adalah Prosentase proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasi yang dapat diakses langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semua Masyarakat Pencari keadilan yang hadir. Setiap masyarakat yang hadir langsung disuguhkan oleh informasi dengan *sistem informasi penelusuran perkara* (SIPP/CTS) mampu mengakses lebih detail masing– masing perkara. dan pada aplikasi SIPP online yang di tampilkan di website pn-tolitoli.go.id sudah memuat perkara-perkara yang putus maupun yang masih dalam proses persidangan sehingga bisa disimpulkan ditahun 2021 ini persentase publikasi putusan perkara baik tidak yang menarik perhatian maupun yang menarik perhatian secara online mencapai 100%. Perkara yang menarik Perhatian dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.47 Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online

Jumlah Perkara yang enarik Perhatian tahun 2021	Jumlah Putusan Perkara yang dapat diakses secara online
1	1

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100$$

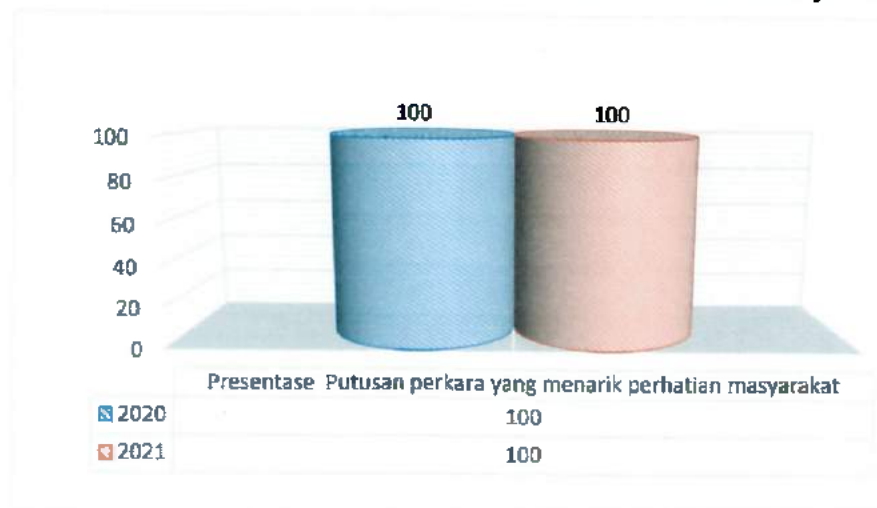
$$= 100\%$$

Adapun perbandingan Pencapaian target Indikator kinerja Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari, sebagaimana pada table dan grafik berikut:

Tabel 3.48 Perbandingan Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses masyarakat secara online dalam waktu 1 hari

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Keterangan
	2020	2021	
Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%	100%	Stabil

Gambar 3.30 Grafik presentase putusan yang menarik Perhatian masyarakat



SASARAN STRATEGIS III

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Tolitoli. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan

Negeri Tolitoli 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.49 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0 %	0 %
		c Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 3 indikator yaitu:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Analisa terhadap pencapaian masing-masing indikator sasaran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja: a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeolah}} \times 100$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.50 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

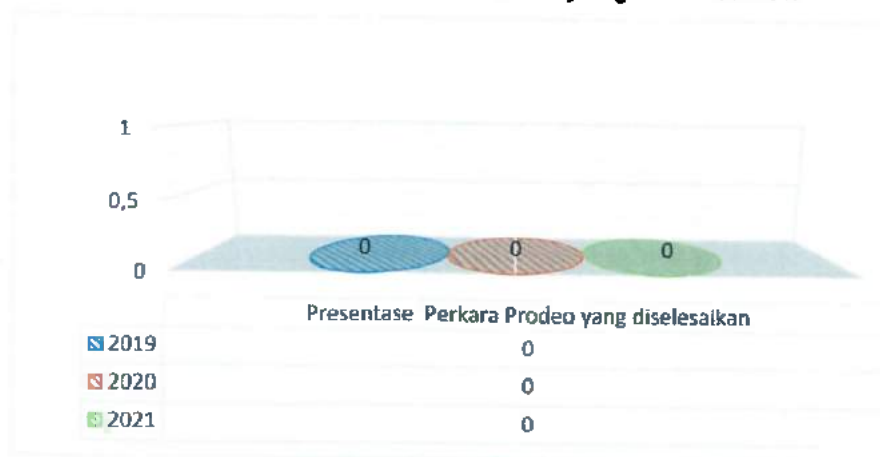
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%

Pada tahun 2021 tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo baik dari masyarakat langsung atau penasihat hukum. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Tolitoli dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 3.51 Jumlah Perkara prodeo Pada Pengadilan Negeri Tolitoli

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi
2021	0	0	0%
2020	0	0	0%
2019	0	0	0%

Gambar 3.31 Grafik Perkara Prodeo yang diselesaikan



Indikator Kinerja: b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja "Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.52 Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0%	0%

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 0%.

Tabel 3.53 Jumlah Perkara Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

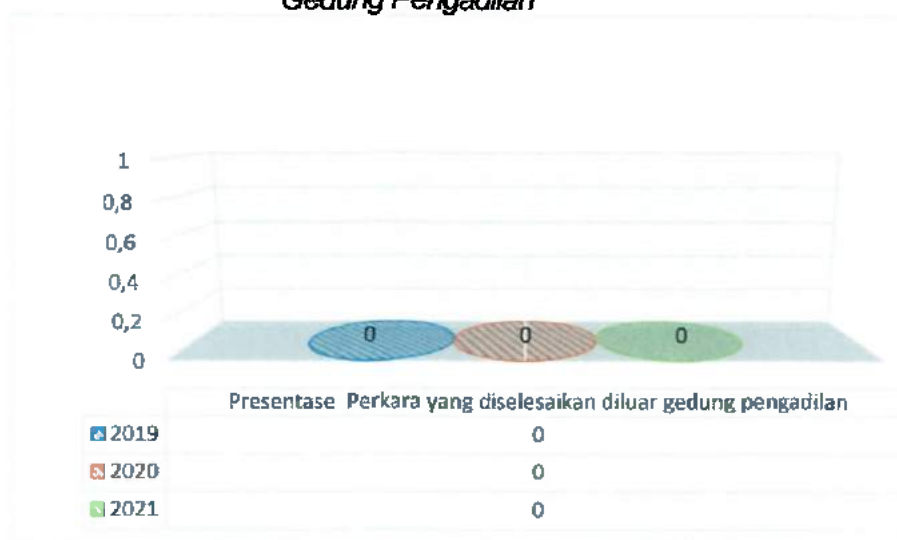
Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
2021	0

Pada tahun 2021 tidak ada perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Negeri Tolitoli dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 3.54 Perbandingan Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	Realisasi (%)
2021	0	0%
2020	0	0%
2019	0	0%

Gambar 3.32 Grafik presentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan



Indikator Kinerja: c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$$

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja "Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)" pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.55 Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.56 Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang Mendaftar pada Posbakum	Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang Terlayani pada Posbakum
2021	30	30

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Realisasi} &= \frac{30}{30} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Tolitoli dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 3.57 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)

Tahun	Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)	Realisasi (%)
2021	30	100%
2020	24	100%
2019	27	100%

Gambar 3.33 Grafik presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)



**SASARAN
STRATEGIS
IV**
**MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN**

Realisasi dan capaian indikator sasaran kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.58 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15 %	0 %	0 %

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100$$

Pada tahun 2021 jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak 71. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkara yang sudah BHT.

Tabel 3.59 Jumlah Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Putusan Perkara Yang sdh BHT dan ditindaklanjuti (Dieksekusi)
2021	71	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 0% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{71} \times 100$$

$$= 0\%$$

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Tolitoli dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 3.60 Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tahun	Jumlah putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi (%)
2021	0	0%
2020	0	0%
2019	1	2,17%

Gambar 3.34 Grafik presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2021, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp.4.194.984.000,- (empat miliar seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp.4.166.406.809,- (empat miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus Sembilan rupiah) sehingga realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 99,32% lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 95,71%.

Rincian Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

➤ **Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai****Tabel 3.61 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021**

KODE AKUN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
001	Gaji dan Tunjangan			2.888.738.000	2.881.864.218	17.881.782	99,39
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			2.888.738.000	2.881.864.218	17.881.782	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1.006.082.000	996.811.888	9.270.112	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Thn	559.482.000	559.482.000	547.385.760	12.096.240	
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1 Bln	72.800.000	72.800.000	72.876.480	-76.480	
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1 Bln	76.000.000	76.000.000	76.580.760	-580.760	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			18.000	18.481	-481	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Thn	18.000	18.000	18.481	-481	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1 Bln	3.000	3.000	3.734	-734	
511121	Belanja Tunj. Standard PNS			84.338.000	82.867.760	1.470.240	
	Belanja Tunj. Suami / Istri PNS	1 Thn	83.860.000	83.860.000	83.836.260	23.740	
	Belanja Tunj. Suami / Istri PNS (gaji ke 13)	1 Bln	6.243.000	6.243.000	6.382.480	-139.480	
	Belanja Tunj. Suami / Istri PNS (gaji ke 14)	1 Bln	6.243.000	6.243.000	6.730.000	-487.000	
511123	Belanja Tunj. Anak PNS			17.382.000	16.462.388	919.612	
	Belanja Tunj. Anak PNS	1 Bln	14.000.000	14.000.000	13.960.000	40.000	
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1 Bln	1.891.000	1.891.000	1.178.288	712.712	
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1 Bln	1.891.000	1.891.000	1.313.074	577.926	
511125	Belanja Tunj. Struktural PNS			28.148.000	28.148.000	-	
	Belanja Tunj. Struktural PNS	1 Thn	24.100.000	24.100.000	24.100.000	-	
	Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1 Bln	2.010.000	2.010.000	2.010.000	-	
	Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1 Bln	2.010.000	2.010.000	2.010.000	-	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			1.132.880.000	1.132.486.000	394.000	
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1 Thn	972.900.000	972.900.000	972.886.000	14.000	
	Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1 Bln	80.040.000	80.040.000	79.626.000	414.000	
	Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1 Bln	80.040.000	80.040.000	79.656.000	384.000	
511126	Belanja Tunj. PPH PNS			188.331.000	186.886.480	1.444.520	
	Belanja Tunj. PPH PNS	1 Thn	188.289.000	188.289.000	186.846.480	2.443.520	
	Belanja Tunj. PPH PNS (gaji ke 13)	1 Bln	18.621.000	18.621.000	18.693.808	-72.808	
	Belanja Tunj. PPH PNS (gaji ke 14)	1 Bln	18.407.000	18.407.000	18.387.472	20.528	
511128	Belanja Tunj. Bersas PNS			84.760.000	83.883.220	876.780	
	Belanja Tunj. Bersas PNS	1 Thn	84.760.000	84.760.000	83.883.220	876.780	
511129	Belanja Uang Makan PNS			188.387.000	186.730.000	1.657.000	
	Belanja Uang Makan PNS	1 Thn	186.387.000	186.387.000	186.730.000	-343.000	
511161	Belanja Tunjangan Umum PNS			7.660.000	7.160.000	500.000	
	Belanja Tunj. Umum PNS	1 Thn	6.100.000	6.100.000	6.080.000	20.000	
	Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 13)	1 Bln	726.000	726.000	660.000	60.000	
	Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 14)	1 Bln	726.000	726.000	660.000	60.000	
511167	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim			232.800.000	232.800.000	-	
	Tunjangan Kemahalan Hakim 9 ORG x 12 BLN	9* 12	2.400.000	232.800.000	232.800.000	-	

➤ **Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional dan Non Operasional****Tabel 3.62 Rincian Realisasi Belanja Barang Operasional dan Non Operasional Anggaran DIPA 01 Tahun 2021**

KODE AKUN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
	OPERASIONAL KANTOR + LAYANAN UMUM			1.188.748.500	1.177.852.591	10.895.909	99,08
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.183.748.500	1.173.877.591	10.870.909	99,10
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			310.841.000	310.536.300	144.700	99,95
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			201.536.000	201.485.800	50.200	
	Satpam 2 ORG x 13 BLN	26	08	1.920.000	49.920.000	-	
	Pengemudi 2 ORG x 13 BLN	26	08	1.920.000	49.920.000	-	
	Pramubakti 4 ORG x 13 BLN	52	08	1.750.000	91.000.000	-	
	Langganan Koran / Majalah	12	Bln	150.000	1.800.000	-	
	Penggunaan dan Pengjilidan	1	Thn	2.000.000	1.980.800	19.200	
	Air Minum	11	Bln	136.000	1.496.000	1.465.000	31.000
	Biaya Penggantian Inventaris Lama / Pembelian Inventaris Pegawai Baru 3 ORG x 1 THN	3	OT	1.800.000	5.400.000	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			35.800.000	35.735.000	65.000	
	Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	1	Thn	35.800.000	35.735.000	65.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			73.505.000	73.475.500	29.500	
	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1	Thn	73.505.000	73.475.500	29.500	
B	LANGKAHAN DAYA DAN JASA			343.940.000	339.074.468	4.765.532	98,61
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			226.000.000	225.688.773	311.227	
	Tambahan Langganan Internet	1	Thn	60.000.000	60.000.000	-	
	Langganan Internet	1	Thn	156.000.000	156.000.000	-	
	Langganan Web Hosting	1	Thn	6.984.000	6.671.500	312.500	
	Lisensi Video Conference	1	Thn	3.016.000	3.015.273	727	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			8.400.000	8.399.600	400	
	Biaya Pengiriman Surat	12	Bln	700.000	8.399.600	400	
522111	Belanja Langganan Listrik			96.000.000	91.844.795	4.155.205	
	Biaya Langganan Listrik	12	Bln	8.000.000	91.844.795	4.155.205	
522112	Belanja Langganan Telepon			12.240.000	12.005.400	234.600	
	Biaya Langganan Telepon	12	Bln	1.020.000	12.240.000	12.005.400	234.600
522113	Belanja Langganan Air			1.200.000	1.137.900	62.100	
	Biaya Langganan Air	12	Bln	100.000	1.200.000	1.137.900	62.100
C	PEMELIHARAAN KANTOR			408.487.500	408.264.823	222.677	99,95
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			206.862.500	206.009.000	85.500	
	Pemeliharaan Gedung	1925	M2/TH	101.500	195.387.500	195.334.000	53.500
	Pemeliharaan Halaman	75	M2	153.000	11.475.000	-	

KODE AKUN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			79.000.000	78.989.900	10.100	
	Pemeliharaan Rumah Dinas	790 M2	100.000	79.000.000	78.989.900	10.100	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			122.625.000	122.665.923	159.077	
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	3 Unit	23.900.000	71.700.000	71.673.023	26.977	
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	7 Unit	750.000	5.250.000	5.217.900	32.100	
	Pemeliharaan PC	16 Unit	200.000	3.200.000	3.200.000	-	
	Pemeliharaan Laptop / Notebook	8 Unit	500.000	4.000.000	4.000.000	-	
	Pemeliharaan Printer	11 Unit	1.250.000	13.750.000	13.750.000	-	
	Pemeliharaan AC Split	1 Thn	20.200.000	20.200.000	20.145.000	55.000	
	Pemeliharaan Mesin Genset	1 Unit	2.525.000	2.525.000	2.480.000	45.000	
	Bahan Bakar Genset	1 Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			51.960.000	51.960.000	-	100,00
521115	Belanja Honor Operasional Sasaran Kerja			39.720.000	39.720.000	-	
	Honor Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN	12 OB	750.000	9.000.000	9.000.000	-	
	Honor Penguji SPP dan Penanda Tangan SPH 1 ORG x 12 BLN	12 OB	650.000	7.800.000	7.800.000	-	
	Honor Bendahara Pengeluaran 1 ORG x 12 BLN	12 OB	770.000	9.240.000	9.240.000	-	
	Honor Staf Pengelola Anggaran 2 ORG x 12 BLN	24 OB	570.000	13.680.000	13.680.000	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			12.240.000	12.240.000	-	
	Pakaian Dinas Non Hakim 12 ORG x 1 STEL	12 STEL	650.000	7.800.000	7.800.000	-	
	Pakaian Dinas Satpam 2 ORG x 1 STEL	2 STEL	750.000	1.500.000	1.500.000	-	
	Pakaian Dinas Pengemudi 2 ORG x 1 STEL	2 STEL	490.000	980.000	980.000	-	
	Pakaian Dinas Pramubakti 4 ORG x 1 STEL	4 STEL	490.000	1.960.000	1.960.000	-	
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAN JABATAN			1.650.000	1.650.000	100.000	94,29
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1.650.000	1.650.000	-	
	Biaya Bahan	1 Keg	200.000	200.000	200.000	-	
	Biaya Konsumsi	29 OK	50.000	1.450.000	1.450.000	-	
522191	Belanja Jasa Lainnya			100.000	-	100.000	
	Jasa Rehabilitasi	1 K	100.000	100.000	-	100.000	
F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL			7.360.000	5.762.000	1.598.000	78,29
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			7.360.000	5.762.000	1.598.000	
	Biaya Bahan Rapat Koordinasi	1 Thn	410.000	410.000	-	410.000	
	Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi	139 Org	50.000	6.950.000	5.762.000	1.188.000	

KODE AKUN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
G	KONSULTASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING			26.400.000	25.900.000	500.000	98,11
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			26.400.000	25.900.000	500.000	
	> Konsultasi Ke PT Palu					-	
	Transportasi 1 ORG x 1 PP x 9 KEG	9 OK	700.000	6.300.000	6.300.000	-	
	Uang Harian Dinas Luar Kota 1 ORG x 2 HARI x 9 KEG	36 OH	370.000	11.100.000	11.100.000	-	
	Biaya Penginapan 1 ORG x 2 HARI x 9 KEG	18 OH	500.000	9.000.000	8.500.000	500.000	
H	KONSULTASI KE KPPN / KANWIL / KPKHL			3.910.000	100.000	2.910.000	3,32
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			2.910.000	-	2.910.000	
	> Konsultasi Ke Kanwil						
	Transportasi Udara 1 ORG x 1 PP x 4 KEG	1 OK	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	
	Uang Harian 1 ORG x 3 HARI x 4 KEG	3 OH	370.000	1.110.000	-	1.110.000	
	Biaya Penginapan 1 ORG x 3 HARI x 4 KEG	2 OH	400.000	800.000	-	800.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			100.000	100.000	-	
	Transport 3 ORG x 1 PP x 6 KEG	1 OK	100.000	100.000	100.000	-	
I	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP			7.250.000	7.000.000	250.000	96,53
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			7.250.000	7.000.000	250.000	
	Test Narkoba	29 OK	250.000	7.250.000	7.000.000	250.000	
J	PENANGGULANGAN COVID 19			22.850.000	22.670.000	180.000	99,21
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			22.850.000	22.670.000	180.000	
	Obat - Obatan / Vitamin	1 Pkt	10.010.000	10.010.000	9.656.000	124.000	
	Masker / Hand Sanitizer / Thermogun	3 Pkt	4.000.000	12.000.000	11.984.000	16.000	
	Disinfektan	3 Pkt	260.000	840.000	800.000	40.000	
1066 EAC	Layanan Umum			5.000.000	4.775.000	225.000	
003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan			5.000.000	4.775.000	225.000	95,50
052	Non Operasional Satker Daerah			5.000.000	4.775.000	225.000	
A	PENANGANAN COVID-19 NON OPERASIONAL			5.000.000	4.775.000	225.000	
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			5.000.000	4.775.000	225.000	
	Rapid Test	1 Pkt	5.000.000	5.000.000	4.775.000	225.000	

➤ **Pagu dan Realisasi Belanja Modal****Tabel 3.63 Rincian Realisasi Belanja modal tahun 2021**

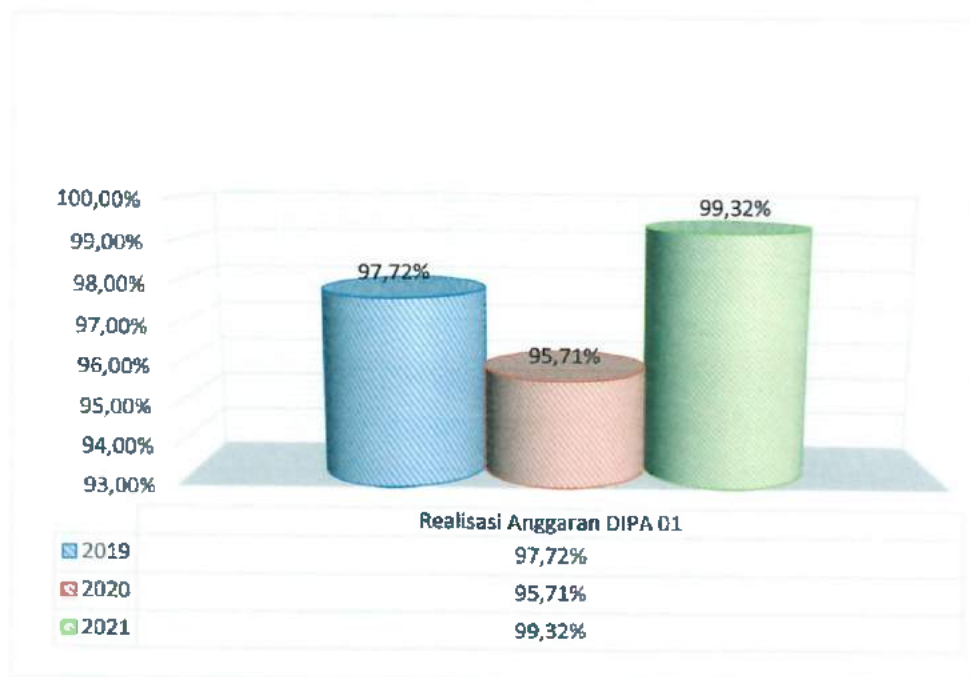
KODE AKUN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			137.500.000	137.500.000	-	100,00
1071.EAD	Layanan Sarana Internal			137.500.000	137.500.000	-	
001	Layanan Sarana Internal			137.500.000	137.500.000	-	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			87.500.000	87.500.000	-	
A	Pengadaan Lanjutan PC Kepaniteraan			37.500.000	37.500.000	-	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			37.500.000	37.500.000	-	
	Pengadaan Lanjutan PC Kepaniteraan	3 Unit	12.500.000	37.500.000	37.500.000	-	
B	Pengadaan Teleconference			50.000.000	50.000.000	-	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			50.000.000	50.000.000	-	
	Pengadaan Teleconference	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			50.000.000	50.000.000	-	100,00
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			50.000.000	50.000.000	-	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			50.000.000	50.000.000	-	
	Meubelair	1 Set	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	

Perbandingan Realisasi anggaran di tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini

Tabel 3.64 Realisasi Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

NO.	Tahun Anggaran	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Presentase %
1	2021	4.194.984.000	4.166.406.809	99,32%
2	2020	3.800.917.000	3.638.034.472	95,71%
3	2019	3.269.542.000	3.195.105.649	97,72%

Gambar 3.35 Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01



2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2021, jumlah anggaran DIPA 03 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp.71.918.000,- (Tujuh puluh satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp.69.859.500,- Sehingga realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 97,14% lebih tinggi di banding realisasi pada tahun 2020 sebesar

Rincian Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA - (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.65 Rincian Realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2021

KODE AKUN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			71.918.000	69.859.500	2.058.500	97,14
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			71.918.000	69.859.500	2.058.500	97,14
1049.BCA	Perkara Hukum Persebrangan			47.918.000	45.859.500	2.058.500	
1049.BCA.108	Perkara Pidana yang Diselesaikan Diangkat Pertama di Wilayah Sulawesi Tengah			47.918.000	45.859.500	2.058.500	95,70
051	Pendaftaran Berkas Perkara			28.730.000	28.514.500	215.500	99,25
A	PENDAFTARAN BERKAS PERKARA			28.730.000	28.514.500	215.500	
521211	Belanja Bahan			130.000	-	130.000	-
	Penggandaan dan Penjilidan	130 PKR	1.000	130.000	-	130.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			28.600.000	28.514.500	85.500	99,70
	Alat Tulis Kantor	130 PKR	220.000	28.600.000	28.514.500	85.500	
052	Penetapan Hari Sidang			4.250.000	2.800.000	1.450.000	65,88
A	PENETAPAN HARI SIDANG			4.250.000	2.800.000	1.450.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.250.000	2.800.000	1.450.000	65,88
	Pengiriman Penetapan Hari Sidang	85 PKR	50.000	4.250.000	2.800.000	1.450.000	
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			6.688.000	6.595.000	93.000	98,61
A	PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN			6.688.000	6.145.000	43.000	
521211	Belanja Bahan			6.188.000	6.145.000	43.000	99,31
	Konsumsi Makan Terdakwa	212 OK	29.000	6.148.000	6.145.000	3.000	
	Konsumsi Makan Pengamanan Kepolisian	1 OK	40.000	40.000		40.000	
B	KIMWASMAT			500.000	450.000	50.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500.000	450.000	50.000	90,00
	Perjalanan Kimwasmat	10 OK	50.000	500.000	450.000	50.000	
054	Minutasi Upaya Hukum			1.950.000	1.950.000	-	100,00
A	MINUTASI / UPAYA HUKUM			1.950.000	1.950.000	-	
521211	Belanja Bahan			1.950.000	1.950.000	-	100,00
	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	130 PKR	15.000	1.950.000	1.950.000	-	
055	Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			2.500.000	2.500.000	-	100,00
A	PENGIRIMAN PETIKAN / SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU / TERDAKWA			2.500.000	2.500.000	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.500.000	2.500.000	-	100,00
	Pengiriman Petikan / Salinan Putusan	50 OK	50.000	2.500.000	2.500.000	-	

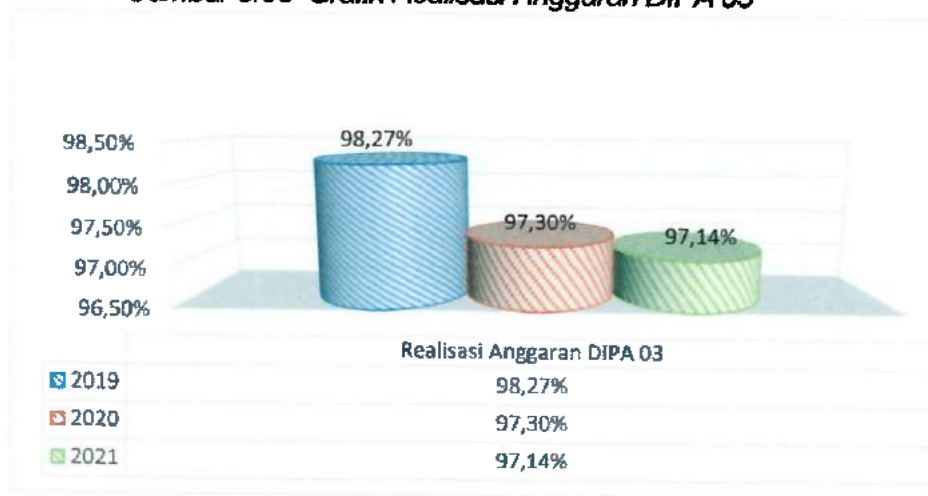
KODE AKUN	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH PAGU	REALISASI	SISA PAGU	%
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan			2.500.000	2.500.000	-	100,00
A	PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN			2.500.000	2.500.000	-	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.500.000	2.500.000	-	100,00
	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	50 OK	50.000	2.500.000	2.500.000	-	
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama			700.000	500.000	200.000	71,43
A	PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA			700.000	500.000	200.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			200.000	-	200.000	-
	Pengiriman Salinan Putusan	10 PKR	20.000	200.000	-	200.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500.000	500.000	-	100,00
	Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa / Terdakwa	5 OK	50.000	250.000	250.000	-	
	Pemberitahuan Putusan	5 OK	50.000	250.000	250.000	-	
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			600.000	500.000	100.000	83,33
A	PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA			600.000	500.000	100.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			100.000	-	100.000	-
	Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali	5 PKR	20.000	100.000	-	100.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500.000	500.000	-	100,00
	Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada JPU / Terdakwa / Penasehat Hukum	5 OK	50.000	250.000	250.000	-	
	Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5 OK	50.000	250.000	250.000	-	
1049 QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	1 Org		24.000.000	24.000.000	-	100,00
1049 QBA.032	Pos Bantuan Hukum	1 Org		24.000.000	24.000.000	-	
051	Pos Bantuan Hukum			24.000.000	24.000.000	-	100,00
A	BELANJA JASA KONSULTAN			24.000.000	24.000.000	-	
522131	Belanja Jasa Konsultan			24.000.000	24.000.000	-	100,00
	Honor Advokat / Pengacara Piket 1 ORG x 2 JAM x 10 HARI x 12 BLN	240 OJ	100.000	24.000.000	24.000.000	-	

Perbandingan Realisasi anggaran di tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.66 Realisasi Anggaran DIPA 03

NO	Tahun Anggaran	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Presentase %
1	2021	71.918.000	69.859.500	97,14%
2	2020	76.260.000	74.197.500	97,30%
3	2019	76.260.000	74.944.200	98,27%

Gambar 3.36 Grafik Realisasi Anggaran DIPA 03



BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Tolitoli dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Tolitoli menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran strategis yang diukur dengan 14 Indikator tersebut, secara umum dari 14 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 5 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan dan ada 7 Indikator belum tercapai targetnya yang disebabkan oleh faktor eksternal serta ada 2 indikator kinerja sasaran yang tidak dapat direalisasikan yaitu

perkara prodeo, perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, karena tidak ada anggaran yang di alokasikan untuk Perkara prodeo dan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada Dipa 03 Tahun 2021.

Sementara itu, penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan yaitu mencapai 99,32%. dibandingkan pada tahun 2020 mencapai 95,71% untuk DIPA 01 (099382), dikarenakan kendala-kendala yang ada pada tahun sebelumnya yaitu adanya Pandemi Covid-19 sudah teratasi sehingga target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat direalisasikan pada tahun 2021. Sedangkan DIPA 03 (099383) tahun 2020 sebesar 97,30% dan ditahun 2021 terjadi penurunan realisasi sebesar 97,14%. Terjadinya penurunan realisasi anggaran pada Dipa 03 dikarenakan anggaran untuk Konsumsi makan terdakwa tidak dapat di realisasikan sesuai target karena sidang dalam masa pandemi di lakukan secara Virtual.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai instrumen kontrol yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tolitoli.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan

pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Tolitoli.

3. Menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward and punishment.

LAMPIRAN



SK TIM PENYUSUN LKjIP



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
NOMOR: W21-U4/ 22 /OT.01.21/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

- Menimbang :**
- a. Bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tahunan yang berisi keadaan perkara, sumber daya manusia, pengolahan keuangan, Pelayanan publik serta pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), yang terdiri ketua Tim, sekretaris dan anggota;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampiran dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai TIM Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Tolitoli.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tentang Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Tolitoli;
- Kesatu** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukannya sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Tolitoli;
- Ketiga** : Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Tolitoli bertugas menghimpun bahan-bahan laporan sekaligus menyusun Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada tanggal : 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,



SAPTONO

Tembusan:

Disampaikan Kepada TYH:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta
2. Direktur Jendral Badan PERadilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli
4. Arsip

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor
W21-U4/ 22 /OT.01.2/2022 tentang Tim Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pengadilan
Negeri Tolitoli

**Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	2	3	4
1	SAPTONO, SH.,MH.	Ketua	Ketua
2	ARIFIN BATALIPU	Panitera	Sekretaris
3	INDRAWATI M. ISHAK	Sekretaris	Anggota
4	MUHAMMAD ASYRI ZULKIFLI RUKKA, SH.	Panmud Pidana	Anggota
5	Pt. SHANDRA LIEVANA MADO, SH.	Panmud Perdata	Anggota
6	Pt. MARTURASI PAKPAHAN, SH.	Panmud Hukum	Anggota
7	AHMAD MUNANDAR SYAHRIR, SE.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8	ANDI NURLINA, S.IP.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana	Anggota
9	MULTI, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
10	ALDI AHMAD SOPIAN, S.T.	Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

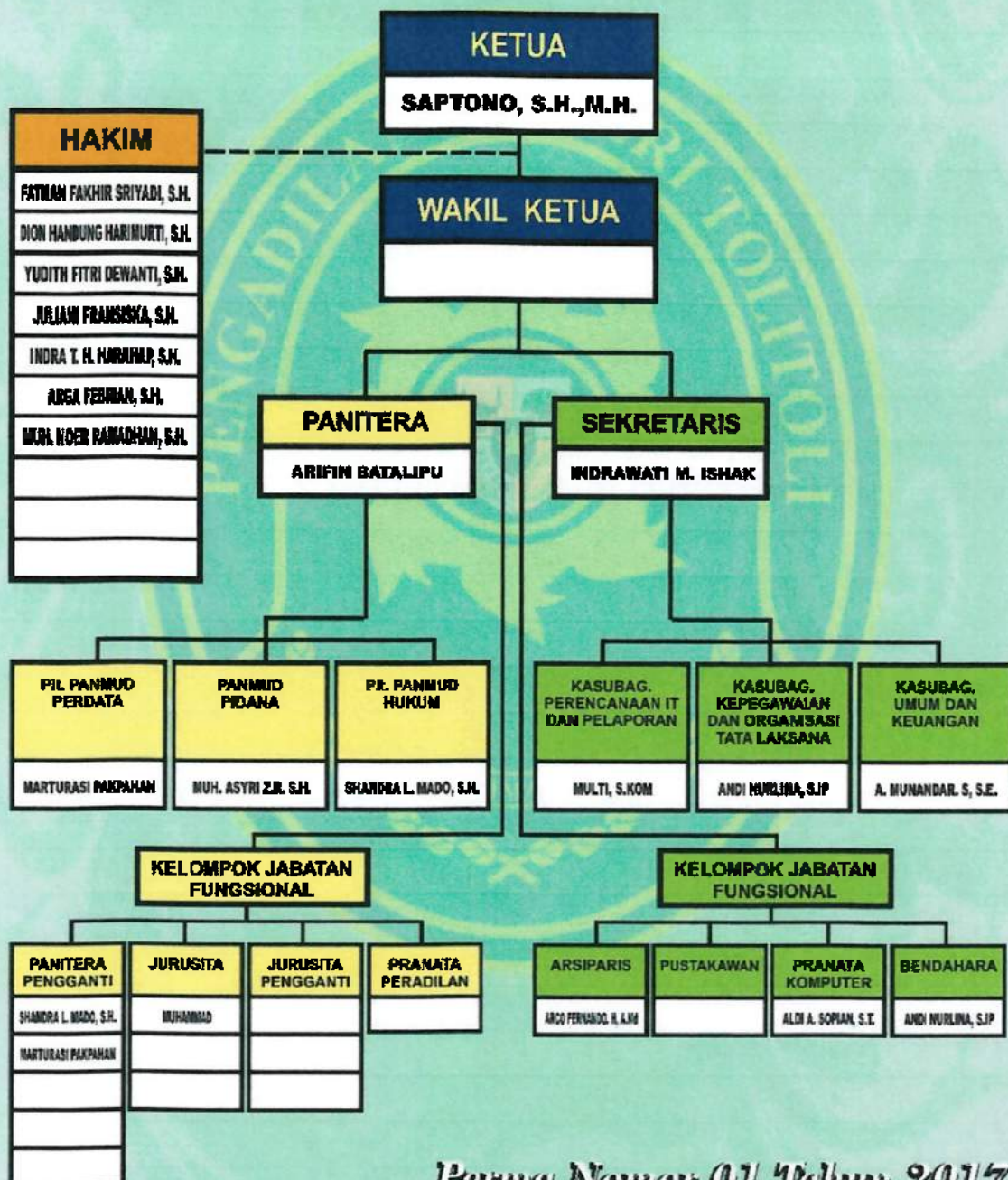


SAPTONO

A blue, wavy banner with a 3D effect, featuring a white border and a slight shadow. The text is written in white, bold, uppercase letters.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



Perma Nomor 01 Tahun 2017

MATRIKS TAHUN 2020-2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					STRATEGIS		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
						2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN			
1	Teroptimalnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli	Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdara - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum	Perkara Peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	Perkara	130	Rp. 71.918.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdara - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	88% 95%	88% 95%	88% 95%					
		Persentase penurunan sisa perkara	100%		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdara - Pidana	100% 100%	100% 100%	20% 85%	20% 85%	20% 85%					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	100%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	100% 100% 100%	92% 95% 98%	92% 95% 98%	92% 95% 98%					
					e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan	20%	20%	2%	2%	2%					

[illegible]



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c.	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Catatan: • Tn = Sisa perkara tahun berjalan • Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
	d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi _____ x 100% Jumlah perkara pidana anak Catatan : • Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor:Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu _____ x 100% Jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi _____ x 100% Jumlah perkara yang dilakukan mediasi Catatan : • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap _____ x 100% Jumlah berkas yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Jumlah putusan perkara Yang diupload dalam website _____ x 100% Jumlah Perkara yang putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan _____ x 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

miskin dan terpinggirkan			Pemra No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan		
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan _____ x 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan Catatan : • Pemra No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (Zetting Plaza, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c.	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum _____ x 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Bantuan Hukum (Posbakum)	• Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)		
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti _____ x 100% Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli,



SARTONO, S.H., M.H.
NIP. 197607182001121003

A blue, three-dimensional wavy banner with a slight shadow, containing white text.

**RENCANA KINERJA TAHUN 2021
(RKT)**

RENCANA KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase penurunan sisa perkara perdata	100%
		Persentase penurunan sisa perkara pidana	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	15%

Tolitoli, 02 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli


SAPTONO, SH.MH.
 Nip: 197607182001121003

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : Saptono. SH.,MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Toli Toli Kelas II

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

N a m a : Dr. Mochamad Djoko, S.H.,M.Hum
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum
NIP. 195604051983031003

Palu 21 Januari 2021
Pengadilan Negeri Toli Toli Kelas II
Ketua

Saptono. SH.,MH
NIP. 19760718 200112 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W21-U4/ OT.01.1/II/2021
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase Penurunan sisa perkara Perdata	100%
		Persentase Penurunan sisa perkara Pidana	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	20%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index Kepuasan Pencari Keadilan	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%

		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	15%

Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.763.677.000.
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000.
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 76.269.000.

Tolitoli, 21 Januari 2021



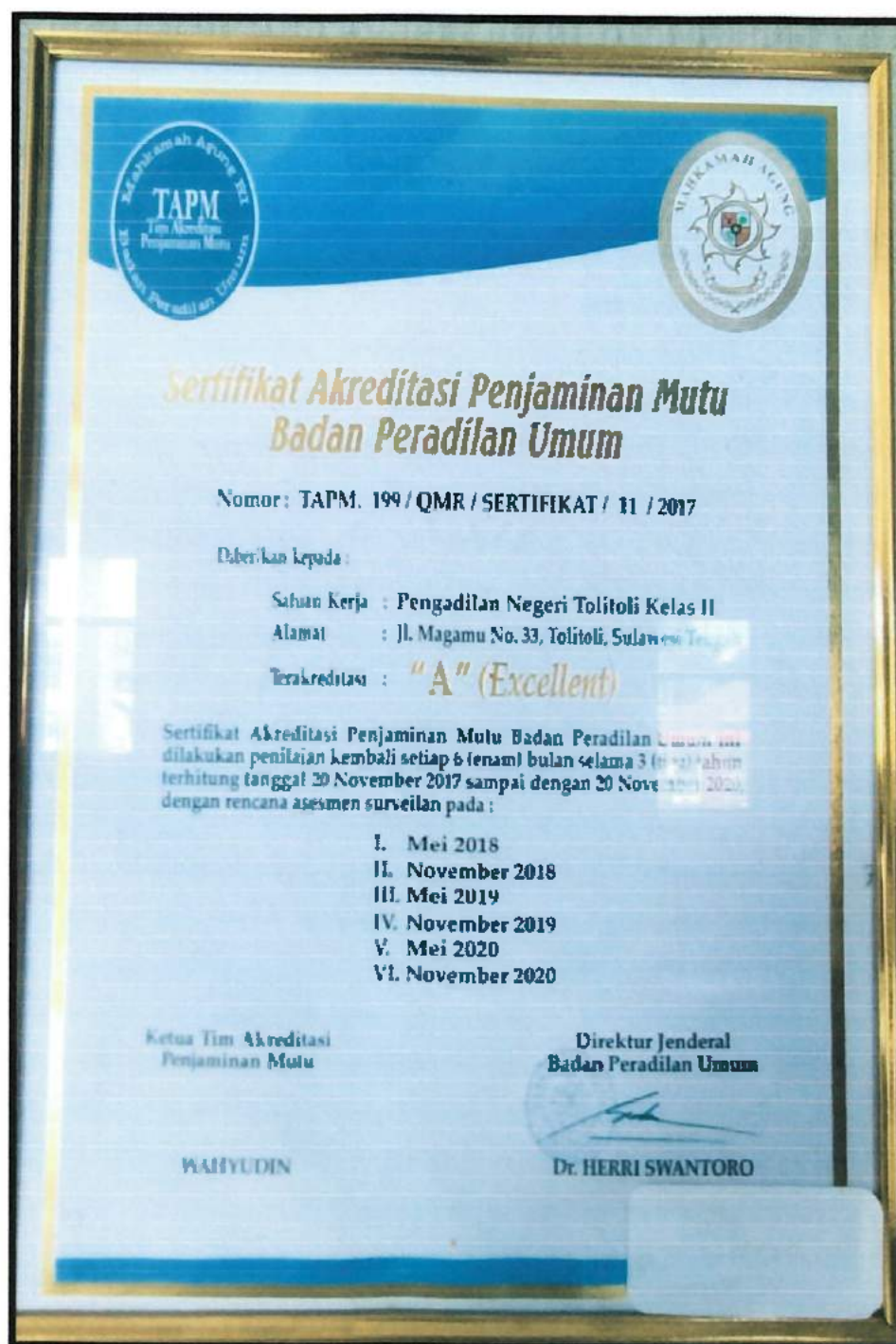
Ketua,
SAPTONO, S.H.,M.H.
NIP. 197607182001121003

**PENGHARGAAN YANG TELAH DITERIMA OLEH
PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**

**Penghargaan Peringkat I Capaian IKPA Pagu Kecil Tahun
Anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan.**



**Akreditasi dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
dengan predikat A Excelent.**



**Penghargaan Peringkat I sebagai Pengadilan Terbaik dalam
Pelaksanaan Mediasi pada Kategori Peradilan Umum Kelas II**

